

**HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL
PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK ATAS PENEMPATAN THAAD
2016-2017**

SKRIPSI



Oleh:

Rosyiana Mutmainnah

14323019

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

**HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL
PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK ATAS PENEMPATAN THAAD**

2016-2017

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Rosyiana Mutmainnah

14323019

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

**HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL
PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK ATAS PENEMPATAN THAAD
2016-2017: STUDI KASUS LOTTE GROUP**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
2. Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A.
3. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Tanda Tangan

Karina
[Signature]
[Signature]

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Rosyiana Mutmainnah
No. Mahasiswa : 14323019
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Hubungan Pemerintah Korea Selatan-Chaebol Pasca
Penerapan Sanksi Tiongkok Atas Penempatan THAAD 2016-2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Yang menyatakan,



Rosyiana Mutmainnah

HALAMAN PERSEMBAHAN



Yang utama dari segalanya.....

Untuk semua cita dan harapan, puji syukur kehadiran Allah SWT.

Terima kasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk mewarnai hidupku dan Engkau gariskan menjadi takdir dalam hidupku. Terima kasih Ya Allah untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan dalam penghujung awal perjuanganku. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada

Nabi Muhammad SAW.

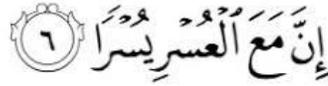
Kupersembahkan karya sederhana ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih tiada tara kepada orang yang sangat aku sayangi dan cintai serta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku

“Kedua Orang Tuaku Tersayang”

Bapak Muhammad Rosyid dan Ibu Rumiyaatun

Terima kasih teruntuk bapak dan ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus. Kata-kata bapak dan ibu yang selalu memotivasi telah membuatku dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Karena doa dan harapan bapak dan ibu, aku dapat menyelesaikan studiku dengan baik. Terima kasih atas perjuanganmu dalam mendidik, merawat dan mendukung segala langkahku. Semoga ini menjadi langkah awal anakmu untuk berjuang, dan membuat kalian bangga dan bahagia.

HALAMAN MOTTO



“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan”

-Q.S. Al-Insyirah : 6-

“Don’t wait until you are ready to take action. Instead, take action to be ready”

-Jensen Siaw-

*“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and
hard work”*

-Colin Powell-

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Irawan Jari, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi dan dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas bimbingan, pendampingan, dan saran yang telah bapak berikan selama 4 tahun studi saya di HI UII. Semoga bapak selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.
3. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan yang telah bapak berikan selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan saran yang telah bapak berikan kepada saya. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk bimbingan skripsi di sela-sela waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat.

Sekaligus saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat dan semoga bapak selalu berada di bawah lindungan Allah SWT.

4. Dosen-dosen HI UII khususnya Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni, S.IP., M.A., dan serta seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas ilmu, arahan, dan kesabarannya selama kurang lebih 4 tahun ini. Bagi saya, bapak dan ibu adalah dosen-dosen yang luar biasa. Semoga apa yang telah bapak dan ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses selalu untuk bapak dan ibu dosen tercinta.
5. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Semoga Mbak Diah selalu sehat, diberikan umur panjang, dan lancar dalam segala urusan.
6. Kedua orang tua Bapak Muhammad Rosyid dan Ibu Rumiyyatun yang tidak pernah putus dalam mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi untuk terus menuntut ilmu dan berjuang. Terima kasih atas segala pengorbanan, do'a, dan dukungan yang telah bapak dan ibu berikan kepada Rosyi selama ini. Terima kasih telah mempercayai Rosyi dalam segala hal dan selalu memotivasi bahwa Rosyi bisa melakukan apapun dengan baik. Semoga bapak dan ibu selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.
7. Mbak Ellida, Dek Laila, Mas Fajru, Asyraf dan Arsyad yang selalu mendoakan, dan memberikan dukungan agar segera menyelesaikan studi. Terima kasih atas

do'a dan dukungannya untukku selama ini. Semoga kita semua selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.

8. Bayu Kurniahadi Pranoto. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan dukungan kepadaku dari segala arah, sehingga aku tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ku ini.
9. Teman-teman hobi makan, Regina, Vivid, Fariz, dan Faheem. Terima kasih sudah memotivasi agar cepat menyelesaikan skripsiku ini. Terima kasih sudah menemani dan juga menghiburku selama ini. Semoga kalian semua selalu berada dibawah lindungan Allah SWT dan sukses selalu.
10. Teman-teman dekatku selama masa perkuliahan, Rafa, Indah, Rana, Ineke, Ina, Thalia, Bintar dan yang lainnya. Terimakasih dukungannya dan motivasinya selama ini, semoga kalian semua selalu berada dibawah lindungan Allah SWT dan sukses selalu.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelsaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Rosyiana Mutmainnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Signifikasi.....	5
1.5 Cakupan Penelitian.....	6
1.6 Kajian Pustaka.....	7

1.7	Landasan Konseptual	12
1.8	Metode Penelitian.....	17
1.8.1	Jenis Penelitian.....	17
1.8.2	Subjek Penelitian	18
1.8.3	Alat Pengumpul Data.....	18
1.8.4	Proses Penelitian	19
BAB II POLA HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL		
SERTA KONDISI DAN RESPON PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK..20		
2.1	Perkembangan hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol	21
2.2	Dinamika hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol	33
2.3	Kondisi dan Respon Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi.....	35
2.3.1	Pemerintah Korea Selatan.....	35
2.3.2.	Chaebol	38
BAB III ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL		
PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK ATAS PENEMPATAN THAAD		
2016-2017		
3.1	Lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Lotte Group	43
3.2.1	Lobi pemerintah Korea Selatan kepada Lotte Group	43
3.2.2	Lobi Lotte Group kepada pemerintah Korea Selatan	46

3.2	Karakteristik <i>State-Business Relations</i>	48
3.2.1	Transparansi	48
3.2.2	Timbal Balik	50
3.2.3	Menjaga Kredibilitas Negara di antara Pebisnis	52
3.2.4	Membangun Tingkat Kepercayaan Tinggi antara Pemerintah dan Swasta.....	54
3.3.	Analisis penyelesaian permasalahan sanksi Tiongkok atas Penempatan THAAD antara Korea Selatan dan Tiongkok	55
BAB IV PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran dan Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1.....	26
-----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Kerusakan Industri Manufaktur (per Agustus 1951).....	20
Tabel 2.2 Pembangunan Lima Tahun pada Era Park Chung Hee	22
Tabel 2.3 Rencana Tata Kelola dan Restrukturisasi Perusahaan Korea	30
Tabel 2.4 Data Investasi Asing di Korea Selatan	31
Tabel 3.1 Implementasi Karakteristik <i>State-Business Relations</i>	58

DAFTAR SINGKATAN

- APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation
- SBR : State Business Relations
- THAAD : Terminal High Altitude Area Defense

ABSTRAK

Kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Amerika dalam penempatan teknologi Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan telah memicu reaksi dari Tiongkok. Tiongkok secara tegas menentang rencana penempatan THAAD karena dapat membahayakan kepentingan militernya dan dapat mengurangi kemampuan sistem rudal miliknya untuk memantau serangan dari eksternal. Oleh karena itu Tiongkok memutuskan untuk menerapkan sanksi pembalasan kepada Korea Selatan. Penerapan sanksi pembalasan ini telah menimbulkan dampak yang buruk pada ekonomi Korea Selatan dan Chaebol. Melihat adanya dampak yang disebabkan oleh sanksi Tiongkok ini membuat dibutuhkan adanya hubungan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol serta penyelesaian antara Korea Selatan dan Tiongkok agar permasalahan ini cepat terselesaikan.

Kata Kunci: *Korea Selatan, THAAD, Tiongkok, Chaebol*

ABSTRACT

Cooperation between the South Korean government and the US Ministry of Defense in the placement of technology Terminal High Altitude Area Defense in South Korea has triggered a reaction from China. China is firmly opposed to the planned placement of THAAD because it can endanger its military interests and can reduce the ability of its missile system to monitor external attacks. Therefore China decided to impose retaliatory sanctions on South Korea. The application of retaliation sanctions has had a bad impact on the economy of South Korea and Chaebol. Seeing the impact caused by Chinese sanctions, this makes it necessary to have a cooperative relationship between South Korea government and Chaebol and a settlement between South Korea and China so that these problems are quickly resolved.

Keyword: *South Korea, THAAD, China, Chaebol*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal Juli 2016, Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Amerika telah sepakat untuk menempatkan teknologi *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan. Hal ini didasari oleh krisis di semenanjung Korea yang semakin memanas dan adanya ancaman rudal oleh Korea Utara. THAAD merupakan alat milik angkatan udara Amerika yang dirancang untuk menangkis serangan rudal musuh (Meick & Salidjanova, 2017, p. 3). Selama tahun 2017, serangan rudal yang dilakukan Korea Utara mencapai sebanyak 23 rudal dalam 16 kali percobaan, beberapa diantaranya memiliki jarak yang lebih jauh, bahkan mencapai zona eksklusif Jepang (Berlinger, 2017). Penempatan alat ini diharapkan dapat menangkis serangan rudal yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Korea Utara.

Kerjasama Korea Selatan dan Amerika dalam penempatan teknologi THAAD ini telah memicu reaksi dari Tiongkok. Tiongkok telah menemui duta besar Amerika dan Korea Selatan untuk mengajukan protes secara resmi dan menyampaikan ketidaksetujuannya (Meick & Salidjanova, 2017, p. 5). Selain itu, Tiongkok khawatir bahwa dengan adanya penempatan THAAD dapat mengancam situasi strategis Tiongkok karena sistem peringatan radar milik THAAD dapat mengurangi kemampuan sistem rudal milik Tiongkok untuk memantau serangan dari eksternal (Gurtov, 2017, p. 2). Hal ini membuat Tiongkok merasa harus melindungi kepentingan

militernya yang merupakan salah satu prioritas utama kepentingan nasional pemerintah Tiongkok dan juga keamanan negaranya.

Oleh karena itu Tiongkok mengeluarkan pernyataan ancaman bahwa ia akan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Selatan agar rencana penempatan THAAD tidak diteruskan. Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah menjatuhkan sanksi pembalasan kepada Korea Selatan dengan berbagai cara, seperti memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan di negaranya, melarang penampilan artis Korea, dan melarang agen travel membuka destinasi ke Korea Selatan semenjak adanya kesepakatan tersebut (Gurtov, 2017, p. 3). Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan, karena dapat membuat dampak yang serius bagi perekonomiannya.

Selama ini Tiongkok merupakan negara yang mempunyai andil besar dalam perekonomian Korea Selatan. Dalam sebuah data statistik perdagangan tahun 2016, diketahui bahwa Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor terbesar bagi Korea Selatan dengan presentase ekspor sebesar 25,12%, sedangkan impor sebesar 21,41% (WITS, 2016). Selain itu, terdapat banyak perusahaan dari Korea Selatan yang beroperasi di Tiongkok, beberapa diantaranya adalah perusahaan Chaebol. Chaebol sendiri adalah kelompok konglomerat di Korea Selatan yang tercatat sebagai salah satu sejarah keberhasilan sistem konglomerasi dalam pembangunan ekonomi negara. Dalam bahasa Korea atau Hangul, Chaebol terdiri atas dua suku kata yaitu “*Chae*” yang berarti kekayaan dan “*bol*” yang berarti kelompok. Chaebol dapat juga merupakan perusahaan yang dijalankan dan dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, baik dalam hal keuangan ataupun administratif. (Murillo Bonvehí & Yun-

dal, 2013, p. 3). Terdapat beberapa perusahaan besar milik Chaebol yang beroperasi di Tiongkok, antara lain seperti Lotte Group, Samsung Group, Kia Motor, LG Group, Hyundai Motor, SK Group, dan lainnya.

Keputusan Tiongkok untuk memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di negaranya telah menimbulkan efek samping bagi Chaebol dan juga ekonomi Korea Selatan. Dampak yang signifikan dirasakan oleh Lotte Group, karena diketahui telah menyepakati penukaran lahan golf miliknya yang berada di wilayah Seongju kepada pemerintah Korea Selatan untuk dijadikan lokasi penempatan THAAD. Hal ini mengakibatkan pemerintah Tiongkok merasa dicurangi oleh Lotte Group dan kemudian menerapkan boikot pada produk-produk Lotte Group, termasuk Lotte Mart dan Lotte Duty Free. Pada bulan Maret, pemerintah Tiongkok memerintahkan Lotte untuk menutup hampir 90% gerainya di Tiongkok, dan menyebabkan kerugian kurang lebih 300 miliar won (US \$ 263,97 juta) (Reuters, 2017).

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah Korea Selatan mencoba untuk meyakinkan Tiongkok dan juga menjelaskan bahwa penempatan THAAD hanya berfungsi untuk mempertahankan kawasan dari ancaman rudal yang terus meningkat dari Korea Utara. Amerika yang merupakan negara pemilik teknologi THAAD juga turut serta dalam meyakinkan Tiongkok. Amerika telah mengundang Tiongkok untuk melakukan pembicaraan teknis, akan tetapi undangan tersebut di tolak (Panda, 2017). Usaha masih terus dilakukan oleh Korea Selatan, hingga pada akhir bulan Oktober

2017 terdengar kabar bahwa kedua negara telah memutuskan untuk kembali membangun hubungan kerjasamanya.

Mengenai kabar membaiknya hubungan antar kedua negara ini, pada pertengahan bulan November dalam sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang dilaksanakan di Vietnam, Moon Jae In yang merupakan Presiden Korea Selatan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan secara resmi mengkonfirmasi kembalinya hubungan kerjasama antara Korea Selatan dengan Tiongkok (Asia Times, 2017). Adanya konfirmasi tersebut tentunya membuat keputusan sanksi Tiongkok terhadap Korea Selatan juga telah berangsur membaik, meskipun belum secara keseluruhan.

Hubungan bilateral antara Korea Selatan dengan Tiongkok merupakan hubungan yang cukup penting, karena selama ini Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi Korea Selatan. Namun, hubungan antara Korea Selatan dan Chaebol tidak kalah penting karena selama ini keduanya telah banyak bekerjasama untuk menciptakan tingkat perekonomian yang tinggi Korea Selatan hingga seperti saat ini. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sanksi Tiongkok ini selain dibutuhkan adanya pendekatan dengan pemerintah Tiongkok juga dibutuhkan juga hubungan yang baik antara pemerintah Korea Selatan dengan Chaebol. Ketika pasar tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, maka pada saat itulah peranan negara dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan lebih fokus mengkaji mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017, dengan menggunakan studi kasus Lotte Group. Sehingga pertanyaan permasalahan yang akan penulis angkat adalah **bagaimana hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD 2016-2017 ?**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hubungan Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya sanksi dari Tiongkok.
2. Mengetahui kondisi dan respon Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menyikapi sanksi yang diberikan oleh Tiongkok.
3. Mengetahui penyelesaian masalah antara Korea Selatan dan Tiongkok

1.4 Signifikansi

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena dalam menjalankan perekonomian negaranya, Korea Selatan memiliki keunikan dimana bukan hanya pemerintah saja yang menjadi aktor utama, melainkan terdapat juga Chaebol yang merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara, dan tentunya juga memiliki peranan penting pada perkembangan ekonomi Korea Selatan. Hubungan harmonis antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol merupakan salah satu penyebab berhasilnya

pertumbuhan ekonomi negara ini. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol setelah adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD. Penelitian ini akan dilihat melalui konsep *State-Business Relations*. Melalui konsep *State-Business Relations* ini peneliti akan melihat hubungan antara pemerintah dengan Chaebol pasca adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, serta melihat bagaimana respon keduanya.

Secara akademik, isu mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD 2016-2017 merupakan penelitian yang belum diteliti sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peranan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang tinggi dan stabil. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti, khususnya pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD yang memiliki pengaruh besar pada perdagangan Korea Selatan, karena Tiongkok yang merupakan pasar terbesar bagi ekspor Korea Selatan. Selain itu Korea Selatan juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Tiongkok, mengingat kedua negara ini memiliki letak geografis yang berdekatan, namun dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan, Tiongkok secara terang-terangan telah menolak dan membuat keputusan untuk menerapkan sanksi kepada Korea Selatan.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi Ekonomi Politik Korea Selatan yang berfokus pada hubungan antara pemerintah dengan bisnis swasta. Penulis melihat bahwa hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol sangatlah harmonis

dan bergantung antara satu sama lain. Kemudian dengan adanya ancaman rudal oleh Korea Utara membuat Korea Selatan memutuskan untuk memasang sistem THAAD milik Amerika. Namun ternyata hal ini mengundang penolakan dari Tiongkok, sehingga Tiongkok memutuskan untuk menerapkan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, membahas mengenai hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya ancaman sanksi dari Tiongkok terkait penolakan penempatan THAAD. Penulis akan membatasi periode penelitian dari bermulanya kasus ini pada tahun 2016, sampai dengan dicabutnya sanksi Tiongkok untuk Korea Selatan yaitu pada tahun 2017.

1.6 Kajian Pustaka

Terdapat banyak artikel yang membahas mengenai hubungan antara negara dengan bisnis swasta. Termasuk hubungan antara negara dan bisnis di Korea Selatan. Dalam Jurnal Rhyu Sang Young yang berjudul *The Origins of Korean Chaebols and their Roots in the Korean War*, Young menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol di mulai pasca perang Korea. Pada saat itu kondisi Korea Selatan dalam keadaan memprihatinkan baik ekonomi maupun infrastruktur. Lebih buruknya, harga bahan produk dan bahan pokok meningkat cepat karena sulitnya transportasi dan logistik. Hal itu membuat pemerintah diharuskan untuk membuat kebijakan yang dapat menstabilkan ekonomi negara, yang kemudian dibuatlah kebijakan rekonstruksi ekonomi, dimana pemerintah Korea Selatan memberikan dana bantuan untuk mendorong dan memulihkan kelompok bisnis domestik mereka. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, Rhyu beranggapan bahwa cara yang dilakukan

pemerintah merupakan langkah awal dari hubungan pemerintah dengan bisnis swasta untuk meningkatkan ekonomi negara. Langkah ini merupakan sebuah keberhasilan, dibuktikan dengan perekonomian domestik yang semakin stabil, termasuk harga bahan-bahan pokok maupun produksi. Dalam jurnal ini, Young juga menekankan mengenai pentingnya peranan Syngman Rhee dalam awal pembentukan Chaebol, disebutkan bahwa munculnya Chaebol sangat bergantung pada partai Liberal milik Syngman Rhee (Young, 2005, pp. 203-17).

Berbeda dengan Young, menurut Wonhyuk Lim, dalam tulisannya yang berjudul *The origin and evolution of the Korean economic system*. Pembangunan pesat perekonomian Korea Selatan dimulai pada masa pemerintahan diktator Park Chung Hee pada tahun 1961. Pada saat itu Park mencoba untuk memulai menumbuhkan ekspor dengan cara memberikan subsidi pada setiap perusahaan yang mampu mengekspor produknya dan memberikan jaminan investasi bagi perusahaan dengan nilai ekspor yang tinggi. Kebijakan Park ini telah dianggap berhasil dalam mempercepat pembangunan industri Korea Selatan. Kelompok Chaebol sebagai perusahaan yang berhasil memiliki nilai ekspor tinggi telah mendapatkan jaminan dari pemerintah dan dianggap sebagai pahlawan bagi pembangunan ekonomi Korea Selatan pada saat itu (Lim, 2000).

Dalam buku Sea Jin Chang yang berjudul *Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups ; The Rise and Fall of Chaebols* dijelaskan mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol ketika terjadi krisis ekonomi Asia 1997. Dimana nilai tukar mata uang asing melonjak dari 864 won per dolar,

menjadi 1.690 won per dolar pada bulan Desember. Kejadian ini telah merugikan banyak pihak, mulai dari bangkrutnya sebagian perusahaan Chaebol dan banyaknya investor yang kemudian menarik dana investasi mereka. Hal ini menyebabkan dampak yang serius pada ekonomi Korea, hingga membuat IMF memutuskan untuk turun tangan. IMF berencana mengembalikan kepercayaan ekonomi Korea Selatan dengan mendorong pemerintah untuk mengatur kembali Chaebol. Pemerintah kemudian melakukan suntikan dana publik untuk menyelamatkan bank yang hampir bangkrut dan berusaha mengatur kembali Chaebol secara finansial dengan bantuan bank untuk mengurangi jumlah hutang akibat krisis Asia 1997 (Chang, 2003, pp. 3-9).

Dalam tulisan Joongi Kim yang berjudul *The Next Stage of Reforms: Korean Corporate Governance in the Post-Asian Financial Crisis Era* dijelaskan pemerintah tidak hanya membantu Chaebol dengan bantuan suntikan dana saja, melainkan juga melakukan serangkaian tindakan untuk menegur perusahaan agar mengurangi ketergantungan mereka pada hutang dan meningkatkan transparansi mengenai proses pengambilan keputusan pada perusahaan mereka. Setelah adanya bantuan dari pemerintah, perusahaan Korea dengan sigap merubah sistem mereka agar menjadi lebih baik. Beberapa hal yang dilakukan seperti, meningkatkan transparansi perusahaan dan mengatur kembali manajemen akuntansi mereka. Chaebol juga telah mencoba untuk mengurangi hutang berjangka. Chaebol meyakini bahwa dengan usaha mereka selama ini telah dapat mengatasi masalah tata kelola yang salah (Kim J. , 2006, pp. 4-12).

Meskipun begitu, pada tulisan Wonhyuk Lim dengan judul *The Emergence of the Chaebol and the Origins of the Chaebol Problem*, dikatakan bahwa semenjak terjadinya krisis pada 1997 telah banyak kritik keras mengenai model pembangunan ekonomi Korea, khususnya mengenai hubungan antara pemerintah dan bisnis swasta dan bank. Sistem pembangunan ini dianggap tidak efisien dan tidak efektif untuk sektor keuangan dan sektor korporasi. Selain itu, Chaebol dianggap sebagai salah satu sebab dari terjadinya krisis yang ada di Korea. Sebelumnya pada tahun 1980, permasalahan Chaebol pernah menjadi isu di pemerintahan. Intervensi yang dilakukan negara pada Chaebol dianggap terlalu berlebihan, hal ini dikhawatirkan dapat mendorong ekonomi di ambang pada krisis hutang, meningkatkan masalah ekuitas dan adanya potensi korupsi. Namun terdapat pula pembelaan, bahwa runtuhnya Chaebol dapat memperkeruh masalah keuangan, dan akan adanya usaha lebih dari pemerintah untuk membantu menstabilkan kembali perusahaan besar ini. Sehingga pemerintahan pada saat itu tetap mempertahankan eksistensi hubungannya dengan Chaebol (Lim, 2003, pp. 35-49).

Berbeda lagi dengan tanggapan Chung In Moon dan Rhyu Sang Young dalam buku Kim Young Ree yang berjudul *Redefining Korean Politics Lost Paradigm and New Fision*, keduanya berargumen bahwa penyebab krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan dapat dilihat dari 2 faktor, yakni faktor domestik dan internasional. Pada faktor domestik, dikarenakan adanya kegagalan kebijakan pemerintah akibat dari ketidakkonsistenan kebijakan makro ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan adanya kegagalan dalam mendisiplinkan sektor bisnis. Pada faktor internasional,

terdapat anggapan bahwa adanya krisis yang melanda Korea Selatan tidak terlepas dari efek domino yang terjadi di Thailand, yang kemudian menjalar ke negara-negara Asia lainnya (Moon & Rhyu, 2002, p. 106).

Kurang lebih, seperti itulah hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol selama ini. Hubungan antara pemerintah dengan bisnis swasta dalam sebuah negara sangatlah penting. Dalam studi kasus Korea Selatan, peran pemerintah sangatlah penting untuk Chaebol. Tanpa adanya peranan pemerintah, perusahaan Chaebol tidak dapat berkembang pesat seperti saat ini. Pemerintah adalah pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Chaebol. Begitu juga dengan peranan Chaebol yang tidak kalah penting dalam membantu Korea Selatan untuk meningkatkan ekonomi negara.

Sebelum adanya penerapan sanksi Tiongkok kepada Korea Selatan atas penempatan THAAD, hubungan yang dijalin antara pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah China juga merupakan hubungan yang cukup harmonis. Menurut Si Joong Kim dalam tulisannya *Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention*, dikatakan bahwa hubungan bisnis antara Korea Selatan dan Tiongkok bermula pada tahun 1992. Dalam interaksi ekonomi bilateral antara Tiongkok dan Korea Selatan, perdagangan komoditas dan *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan komponen yang paling aktif. Hubungan ekonomi bilateral keduanya terus meningkat setiap tahunnya dan semakin ketergantungan antara satu sama lain (Kim S., 2012, pp. 237-262).

Dalam tulisan Jae Ho Chung yang berjudul *Korean Views of Korea-China Relations Evolving Perceptions and Upcoming Challenges* dijelaskan bahwa meskipun keduanya ketergantungan antara satu sama lain, namun ketergantungan perdagangan Korea Selatan kepada Tiongkok rupanya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi, dimana menurut data tahun 2010 mencapai 21% dibandingkan ketergantungan Tiongkok yang relatif stabil hanya 6,3% dikarenakan volume perdagangannya yang tumbuh lebih cepat. Hal ini membuat Tiongkok memiliki posisi yang lebih penting untuk perekonomian Korea Selatan (Chung J. , 2012, p. 219).

Dalam tulisan Kim Si-joong yang berjudul *Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention*, Kim menjelaskan bahwa pada dasarnya Tiongkok dengan Korea Selatan telah mempertahankan hubungan ekonomi yang baik selama dua puluh tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan ekspansi yang luar biasa dari adanya perdagangan dan arus investasi antara keduanya. Namun, beberapa perselisihan dalam ekonomi dan perdagangan mulai terjadi diantara keduanya. Kim memperediksi bahwa perselisihan mengenai keamanan, perdagangan, investasi, teknologi, dan perjanjian bikateral antara keduanya dapat diidentifikasi sebagai potensi adanya konflik antara Tiongkok dan Korea Selatan di masa depan (Kim S. , 2012)

1.7 Landasan Konseptual

Untuk mendukung argumen di dalam makalah ini, penulis menggunakan konsep *State-Business Relations* (SBR) melihat dari buku Alberto Lemma dan Diek Willem te Velde yang berjudul *State-Business Relations as Drivers of Economic Performance* (Lemma & te Velde, 2015). Konsep ini menjelaskan mengenai hubungan

antara negara (publik) dan bisnis (swasta). Hubungan keduanya dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari hubungan formal, hubungan informal, dan koordinasi dalam membuat kebijakan. SBR dapat mencakup ekonomi secara keseluruhan ataupun dengan target sektor tertentu. Lemma dan te Velde dalam buku ini menuliskan bahwa efektif atau tidaknya SBR dapat dilihat apakah negara dan bisnis dapat berkolaborasi dan bersinergis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diinginkan atau justru sebaliknya.

Berdasarkan kontribusi Evans (1995), Maxfield dan Schneider (1997) dalam buku Lemma dan te Velde, untuk membuat pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih efektif, *State-Business Relations* diketahui memiliki beberapa karakteristik yaitu: (a) adanya transparansi dalam bertukar informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga pemerintah dalam menetapkan kebijakan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sektor swasta; (b) hubungan timbal balik, dalam memberikan subsidi kepada sektor bisnis, pemerintah harus mengetahui bahwa subsidi yang diberikan akan digunakan secara produktif; (c) menjaga kredibilitas negara di antara pebisnis, kredibilitas negara dalam menjaga komitmennya, bagaimanapun situasinya negara tetap memegang komitmennya terhadap kebijakannya sehingga dapat meningkatkan kredibilitas negara; (d) membangun tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemerintah dan swasta (Lemma & te Velde, 2015, p. 3).

Menurut Lemma dan te Velde, adanya hubungan antara negara dan bisnis mampu membantu mengarahkan perekonomian dalam mengatasi 2 kekhawatiran: Pertama, adanya *market failure*, dimana pasar tidak dapat menjalankan perannya secara

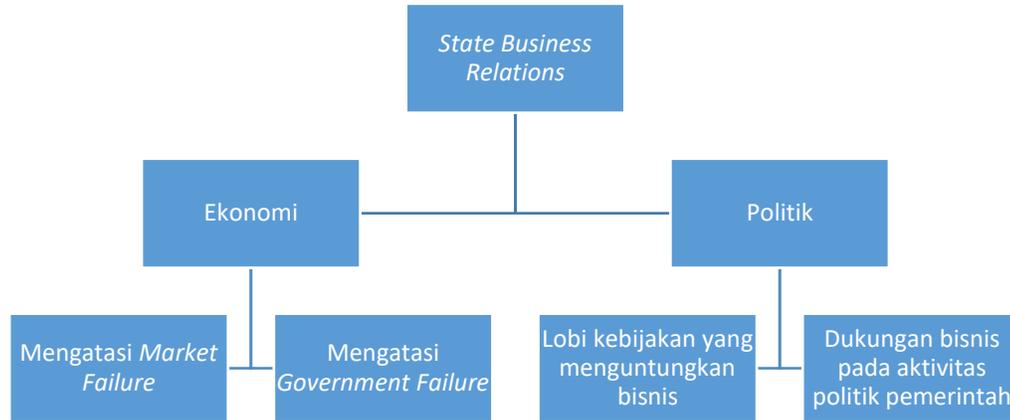
optimal dikarenakan tidak mempunyai kemampuan penuh untuk mendapatkan sumber daya. Kasus kegagalan pasar dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan atau perubahan iklim. Kedua, adanya *government failures*, dimana pendekatan ini menyatakan bahwa pemerintah sendirian saja tidak dapat menyelesaikan *market failure*. Hal ini terjadi ketika pemerintah tidak memiliki informasi yang cukup dan masih terkendala dengan politik yang tidak pasti. Maka dengan adanya SBR akan mencoba menyelesaikan masalah yang ada di pasar dan pemerintahan dengan koordinasi yang baik, sehingga dapat menghasilkan tingkat investasi yang baik dalam sistem pasar dan mengurangi adanya ketidak pastian kebijakan. Untuk mengatasi dua kekhawatiran tersebut, diperlukan adanya hubungan yang harmonis antara keduanya. Dalam posisi ini, negara tidak serta merta mengintervensi secara mutlak pada sektor swasta, namun lebih kepada memposisikan dirinya sebagai pengawal yang menyimak dan mendampingi jalannya perekonomian dengan tetap memberikan ruang gerak yang besar bagi jalannya mekanisme pasar (Lemma & te Velde, 2015, pp. 4-5).

Menurut Stefan Schepers, dalam tulisannya yang berjudul *Business-Government Relations: Beyond Lobbying*, pemerintah menerapkan konsep *State-Business Relations* tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi negara saja. Pemerintah memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai penentu hukum dan tata aturan, peredistribusi kesejahteraan dan menetapkan standar minimum kehidupan, dan organisasi yang mengatur ekonomi pasar. Membahas mengenai ekonomi pasar, ketika pasar mengalami penurunan yang berlanjut, tentunya hal ini akan menyebabkan kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakatnya. Apabila hal ini terjadi, maka

dapat mempengaruhi fungsi dari pemerintah dan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, karena kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah (Schepers, 2010, pp. 7-8).

Pada hubungan antara negara dan bisnis terdapat istilah *lobbying* atau melobi. Aktivitas melobi ini dilakukan pada setiap pemerintahan, baik otoriter ataupun demokratis, dan oleh beberapa aktor. Pada pemerintahan, aktivitas ini sering disebut dengan diplomasi. Aktivitas ini dijalankan dengan metode yang beragam dengan tujuan mencapai lingkungan yang menguntungkan dan apa yang menjadi kepentingannya dapat terpenuhi. Pada perusahaan, melobi dilakukan untuk mempengaruhi otoritas pemerintah dalam mempertimbangkan pandangan dan kepentingan pribadi pada saat memutuskan kepentingan publik dan membuat peraturan tentangnya. Sama halnya dengan pemerintah, aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang menguntungkan bagi pihak bisnis dan merupakan bagian dari strategi perusahaan bisnis untuk kepentingan komersial. Bahkan, bisnis juga menggunakan kontribusi publik untuk mendukung posisi mereka dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat membantu mereka meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam perspektif bisnis, pemerintah harus mendukung dan mendorong kinerja dan investasi bisnis, karena bisnis adalah sumber utama pekerjaan, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi sosial. Oleh karena itu bisnis

membutuhkan dukungan dari pemerintah yang dapat berupa hibah, kredit pajak, atau subsidi (Schepers, 2010, pp. 6-7).



Sumber: penulis

Selain menggunakan konsep *State-Business Relations*, dalam skripsi ini penulis juga akan menggunakan konsep *Issue Linkage* untuk menyelesaikan permasalahan sanksi yang diterapkan oleh Tiongkok. Menurut definisi Ernest B. Haas, *Issue Linkage* yaitu penawaran atau perjanjian tukar menukar oleh dua aktor (negara) yang melibatkan lebih dari satu isu (Haas, 1990, p. 76). Untuk mencapai sebuah kesepakatan, Haas mempertimbangkan 2 tipe *Issue Linkage* yaitu taktis dan substantive; 1) Taktis terjadi ketika isu-isu yang terkait tidak secara koheren terhubung antara satu sama lain; berbeda dengan taktis 2) Substantive, terjadi ketika isu-isu yang terkait masih berkesinambungan antara satu sama lain (Haas, 1980, pp. 371-374).

Untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan konsep ini, maka perlu menentukan aktor-aktor siapa saja yang menjadi *linker* dan *linkee*. *Linker* adalah pihak yang memberikan tawaran barter suatu isu dengan isu lainnya dan *linkee* adalah pihak yang menerima tawaran tersebut memiliki peran untuk menerima tawaran atau

tidak (Mugasejati & Rais, 2011, p. 22). Dalam penelitian ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam pertukaran issue atau barter isu. Pihak pertama atau linker adalah Tiongkok, sementara pihak kedua atau linkee adalah Korea Selatan. Tiongkok berperan sebagai pihak pertama yang menghubungkan dengan isu lain, oleh karenanya peran Tiongkok disebut linker. Sementara Korea Selatan sebagai pihak yang menerima tawaran maka disebut sebagai linkee. Adapun penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam bab selanjutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah pada suatu gejala, fakta, dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada. Metode kualitatif akan menggunakan data yang di ambil melalui wawancara, observasi lapangan, atau dokumen yang ada. Dalam penelitian, metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dari apa yang dapat diamati (Dr. J.R. Raco, 2010). Seperti juga yang dipaparkan oleh Creswell bahwa metode kualitatif adalah sebuah proses dalam penyelidikan suatu fenomena sosial untuk dapat lebih dipahami dan diterapkan dalam suatu metodologi serta melakukan eksplorasi (Creswell, 2009, p. 32).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini meneliti sebuah kasus secara mendalam, dan lebih spesifik. Selain itu, metode kualitatif

memandang ilmu sosial sebagai sebuah disiplin yang tersendiri dan berbeda, karena melibatkan objek subjektif, dan sangat efektif untuk digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan yang ada (Marsh & Stocker, 2010, p. 282). Metode penelitian ini juga berfokus pada pemahaman dan makna dan sering didefinisikan sebagai metode yang sistematis dan intuitif untuk menghasilkan penelitian yang koheren dan efisien (Bakry, 2016, hal. 62).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah aktor yang terkena dampak dari sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD yakni pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Selain menjadi aktor utama, hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol juga menjadi hal yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Mengenai sumber data yang akan ditelusuri, dalam teknik ini akan digunakan metode pengambilan data primer dan sekunder (Sekaran, 2006). Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer yang akan digunakan adalah data yang berasal dari laman resmi pemerintahan dan juga institusi lain seperti kementerian-kementerian di masing-masing negara terkait penelitian ini.

Berbeda dengan data primer, data sekunder sendiri adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelusuran dalam tulisan-tulisan ilmiah atau artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik.

1.8.4 Proses Penelitian

Menurut Prof. Dr. Suryana, proses penelitian terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan mengidentifikasi masalah atau mencari pokok permasalahan yang paling relevan dan menarik untuk diteliti, merumuskan masalah dengan memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut, menyusun kerangka pemikiran, mencari kajian pustaka, yang dilanjutkan dengan mencatat hasil kajian dan hasil bacaan agar gagasan yang muncul dapat disimpan, dan menganalisis data (Suryana, 2010).

Tahap selanjutnya adalah konseptualisasi permasalahan yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian, dilanjutkan dengan menentukan landasan konseptual yang akan mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data dan mengolah data yang didapatkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang didapatkan hingga memperoleh hasil dalam penelitian kemudian setelah itu melakukan interpretasi atau melaporkan hasil dari penelitian tersebut dan terakhir adalah melaporkan hasil dari penelitian (Gulo, 2002).

BAB II

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL SERTA KONDISI DAN RESPON PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK

Hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol selama ini telah banyak diketahui sebagai salah satu yang membuat perubahan pesat pada ekonomi Korea Selatan. Hubungan keduanya di dorong dengan kondisi ekonomi Korea Selatan sebelumnya yang sangat memprihatinkan, ditambah adanya konflik dengan Korea Utara hingga terjadi perang saudara yang semakin membuat kondisi Korea Selatan menjadi lebih parah. Namun, keadaan menyedihkan ini telah berhasil dilewati Korea Selatan dengan berbagai cara yang dilakukannya. Dalam menyelesaikan permasalahan pada sektor ekonomi, pemerintah telah mempercayakannya pada Chaebol untuk bekerjasama dalam membangun ekonomi negara dan terbentuklah hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol hingga saat ini.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pola hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol serta kondisi dan respon pasca penerapan sanksi Tiongkok. Penulis akan membagi pembahasan menjadi 3 sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas mengenai perkembangan hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol, bermula dari berakhirnya perang Korea 1953, dilanjutkan dengan kepemimpinan presiden Park Chung Hee yang telah berhasil meningkatkan ekonomi Korea Selatan, dan kepemimpinan setelahnya yakni Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo, dan Kim Young Sam dan pasca adanya krisis finansial 1997. Sub-bab kedua membahas

mengenai dinamika pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Sub-bab ketiga membahas mengenai kondisi dan respon pasca penerapan sanksi Tiongkok.

2.1 Perkembangan hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol

Membahas mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dengan Chaebol, maka tak lepas dari peristiwa perang Korea. Berakhirnya perang Korea pada tahun 1953 telah membuat keadaan Korea Selatan sangat memprihatinkan, keadaan sebagian besar gedung dan bangunan telah banyak yang rusak dan hancur, tingkat perekonomian yang jatuh, fasilitas industri yang ikut hancur, dan hilangnya bahan baku dan produk. Adanya perang juga telah mempengaruhi ekonomi makro Korea Selatan, anggaran belanja negara meningkat dengan cepat untuk membantu membiayai belanja militer (Rhyu, 2005, pp. 204-205). Hancurnya jalur manufaktur juga menyebabkan lumpuhnya distribusi pada barang dan jasa, sehingga menyebabkan harga bahan produk dan bahan pokok meningkat dengan cepat.

Tabel 2.1 Data Kerusakan Industri Manufaktur (per Agustus 1951)

	Total jumlah kerugian (US\$ 1.000)	Total kerusakan fasilitas (%)
Logam	653	26
Mesin	793	35
Kimia	15.412	33
Tekstil	92.722	64
Keramik	1.644	40
Makanan	1.594	20
Percetakan	2.444	75

Sumber: (Rhyu, 2005, p. 206)

Melihat keadaan negara yang seperti itu membuat pemerintah diharuskan untuk membuat kebijakan yang dapat menstabilkan ekonomi negara dan memperbaiki keadaan yang ada. Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan rekonstruksi ekonomi, dimana pemerintah Korea Selatan memberikan dana bantuan untuk mendorong dan memulihkan kelompok bisnis domestik mereka. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan bisnis domestik untuk melakukan produksi dengan menyesuaikan permintaan kebutuhan pada saat itu. Dengan bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada bisnis domestiknya, maka perekonomian domestik pun menjadi lebih stabil, termasuk harga bahan-bahan pokok maupun produksi (Rhyu, 2005, p. 207). Dengan begitu, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk meneruskan hubungan antara pemerintah dengan bisnis. Interaksi antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam peristiwa inilah yang menjadi awal mula hubungan keduanya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Korea Selatan tidak berhenti disitu saja. Pemerintah terus mencoba untuk melakukan yang lebih baik karena selama ini peningkatan dirasa belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, hingga masa pemerintahan Park Chung Hee. Masa pemerintahan Park Chung Hee (1962 – 1979) dikenal sebagai rezim yang otoriter dan ambisius, namun masa ini merupakan masa mulai bangkitnya perekonomian Korea Selatan secara signifikan. Park memiliki keyakinan bahwa untuk menjadi negara yang kuat, maka dibutuhkan juga perekonomian yang kuat (Cho M. , 2015). Itulah kenapa pada masa pemerintahannya, Park lebih fokus untuk meningkatkan ekonomi negaranya.

Pada awal masa kepemimpinan, Park mencoba memulai dengan membentuk *The Economic Planning Board (EPB)* yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan negara untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat stabilitas politik. Perencanaan pembangunan pada masa Park Chung Hee ini dikenal dengan istilah *Five years Development Plan* atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dapat merubah kebijakan dari industrialisasi berorientasi impor ke pertumbuhan berorientasi ekspor. Berikut merupakan data rencana pembangunan (IPFS, 2016).

Tabel 2.2 Pembangunan Lima Tahun pada Era Park Chung Hee

Tahun	Rencana Pembangunan
1962 – 1966	Memperluas industri energi listrik dan batu bara, pembangunan infrastruktur, produktivitas pertanian, ekspor, dan mempromosikan kemajuan teknologi.
1967 – 1971	Mengubah arah industri ke industri berat agar dapat lebih kompetitif di pasar dunia, pembangunan infrastuktur jalan untuk memudahkan transportasi, dan memfokuskan industri pada industri baja dan petrokimia.
1972 – 1976	Menerapkan <i>Heavy Chemical Industrialization Plan (HCIP)</i> atau rencana penerapan industri kimia berat.
1977 – 1981	Menghadapi adanya penurunan pada PNB dan banyaknya permasalahan ekonomi membuat pembangunan tahun ini lebih fokus pada pemulihan.

Sumber : (IPFS, 2016)

Selain itu, Park juga telah mengarahkan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya pengaturan modal dan peningkatan ekspor. Pada masa pemerintahannya, bank komersial dinasionalisasi dan dikontrol ketat oleh kementerian

keuangan, suku bunga diatur dan diarahkan pada pada industri dan perusahaan tertentu, dan subsidi keuangan diberikan khususnya untuk industri dan perusahaan berbasis ekspor (Mah, 20017). Pada penerapan untuk lebih menumbuhkan ekspor Korea Selatan, Park melakukannya dengan cara menerapkan kebijakan mengenai pemberian subsidi pada setiap bisnis domestik yang mampu mengekspor produknya dan memberikan jaminan investasi bagi perusahaan dengan nilai ekspor yang tinggi. Berdasarkan hasil yang didapat, Chaebol muncul sebagai kandidat terkuat karena memiliki nilai ekspor tertinggi dibandingkan bisnis lainnya (Lim & Hanguk, 2000).

Untuk menepati janjinya, pemerintahan Park Chung Hee telah memberikan dukungan pada Chaebol dan melakukan ekspansi kebijakan untuk mendorong perkembangan Chaebol dengan menerapkan intervensinya. Beberapa dorongan yang diberikan pemerintah seperti bantuan keuangan, pinjaman uang dengan suku bunga rendah, pemotongan pajak, memperluas dan mempermudah akses pasar bagi Chaebol (Phil Sang, 2000, p. 2). Selain itu pemerintah juga melakukan intervensi pada tarif, kuota, dan subsidi ekspor. Intervensi tarif dilakukan pemerintah dengan menciptakan harga pada pasaran, dimana penetapan harga dapat berbeda untuk pembeli asing. Hal ini dilakukan pemerintah Korea Selatan dengan tujuan untuk melindungi industri lokal dari adanya kompetisi dagang dengan asing, sehingga dapat lebih membantu mereka untuk berkembang (Amsden, 1989, pp. 55-78). Meskipun begitu, pemerintah tidak serta merta mengintervensi secara mutlak, namun lebih kepada memposisikan dirinya dengan tetap memberikan ruang gerak yang besar bagi jalannya mekanisme pasar.

Park Chung Hee membuktikan bahwa kebijakannya untuk memberikan dukungan terhadap Chaebol bukanlah tindakan yang salah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil yang telah didapatkan seperti total ekspor yang melambung tinggi dari US\$60 juta di tahun 1962 mencapai US\$1,4 milyar di tahun 1971 dan kenaikan pada GNP yang mencapai 2 kali lipat dari 3,071 milyar menjadi 6,962 milyar pada periode yang sama (Chung C. , 1995, p. 64). Keberhasilan ini tentunya dapat diraih karena adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan Chaebol, selain itu juga karena adanya transparansi antara satu sama lain. Pada tahun 1963, keduanya telah membentuk federasi dengan tujuan untuk menumbuhkan koordinasi antara keduanya (Cho M. , 2015).

Meskipun pemerintahan Park Chung Hee berhasil dalam meningkatkan perekonomian Korea Selatan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang dianggap kurang dalam pemerintahannya (Jwa, 2014), seperti:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tercapai berada di bawah pemerintahan rezim telah menyebabkan penolakan dari banyak kalangan.
- b. Dipimpin oleh pemerintahan yang tidak demokratis, sehingga kerap terjadi pembatasan dalam kebebasan politik dan ekonomi.
- c. Kebijakan industri “Pro-Chaebol” telah menyebabkan ketidakseimbangan pada sektor ekonomi dan ketidakmerataan dalam pembangunan.

Seiring dengan adanya pergantian kepala pemerintahan, dukungan yang diberikan terhadap Chaebol juga berbeda-beda dari pemerintahan Park. Pasca

pemerintahan Park Chung Hee yang bersifat diktator, masyarakat Korea Selatan berharap bahwa kepemimpinan selanjutnya yang dipimpin Chun Doo Hwan dapat merubah sistem pemerintahan Korea Selatan menjadi pemerintahan demokrasi, akan tetapi semua tak sesuai dengan harapan karena pemerintahan Chun Doo Hwan kembali menerapkan sistem otoriter (Kim, Jeon, Kim, & Heo, 2008, pp. 7-8).

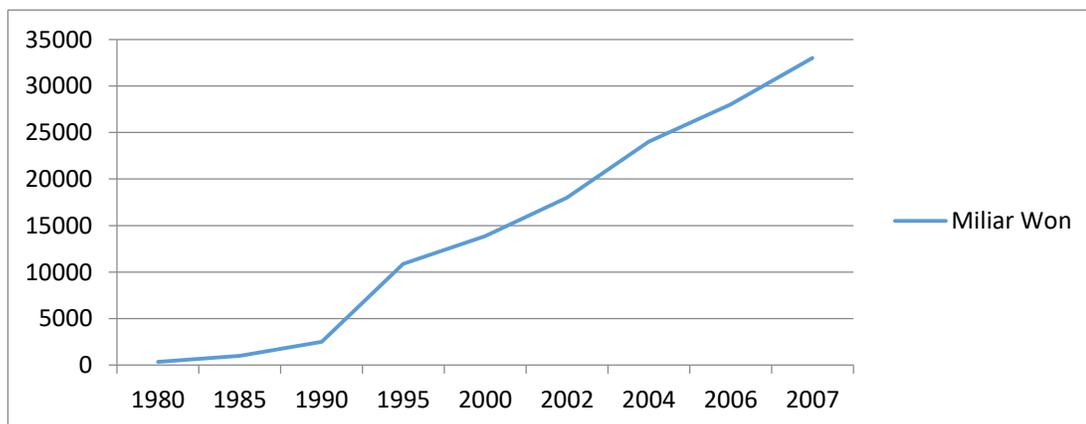
Meskipun memiliki kesamaan dengan sistem otoriter, namun pemerintah Chun menerapkan beberapa kebijakan yang bertolak belakang dari Park. Kebijakan Chun yang dianggap bertolak belakang dengan Park, antara lain yaitu Chun menerapkan kebijakan mengenai pengurangan dukungan pemerintah terhadap Chaebol, dengan membatasi akses kredit Chaebol sehingga bank-bank komersial Chaebol diprivatisasi (Woo, 1991). Selain itu, Chun membatasi ekspansi perusahaan afiliasi Chaebol dengan meminta Chaebol mengatur ulang struktur perusahaan dan melepaskan perusahaan yang tidak dibutuhkan (Lee, 1997). Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kebijakan Park yang sangat mendorong Chaebol untuk meningkatkan ekonomi di pasar Korea Selatan.

Setelah beberapa kali mengalami periode kepresidenan dengan sistem otoriter, pada tahun 1988 kursi presiden Korea Selatan telah berhasil ditempati oleh Roh Tae Woo dengan cara yang demokratis yakni melalui pemilu tahun 1987. Dengan adanya perubahan sistem yang menjadi demokratis, hal ini juga berpengaruh kepada bagaimana hubungan pemerintah dan bisnis. Adanya perubahan ini telah mulai mengikis otoritas pemerintah dalam menjalin hubungan tradisionalnya dengan bisnis,

terutama dengan Chaebol karena selama ini dianggap pemerintah terlalu mengintervensi pasar demi kepentingan Chaebol.

Pada periode pemerintahan ini, pinjaman bank yang dikendalikan pemerintah untuk menyediakan pinjaman murah pada Chaebol telah menurun secara substansial. Chaebol telah mampu untuk memobilisasi modal dan mendapatkan modal di pasar internasional tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sehingga, telah dipastikan bahwa pada periode ini ruang lingkup intervensi pemerintah atas bisnis telah menyempit dan struktur pinjaman ekspor, juga subsidi suku bunga telah diperketat (Cho & Kim, 1995, p. 20). Meskipun pinjaman pemerintah untuk Chaebol telah banyak berkurang, Roh memilih untuk memberikan dukungan yang berbeda dalam meningkatkan daya saing Chaebol di pasar internasional yaitu dengan investasi *research and development* (R&D). Dapat dilihat bahwa pasca tahun 1980, investasi R&D di Korea Selatan telah banyak mengalami peningkatan hingga 60 kali lipat.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Investasi R&D Korea Selatan



Sumber: (Chung S. , 2011, pp. 340-41)

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Kim Young Sam dikenal sebagai pemerintahan yang sangat demokratis. Kim Young Sam telah mulai meliberalisasi ekonomi melalui deregulasi dan pengurangan intervensi pemerintah. Selain itu, Kim telah memutuskan untuk bergabung dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sehingga Kim diharuskan mendorong kebijakan ekonomi, termasuk meliberalisasi nilai tukar mata uang asing, membuka investasi asing secara langsung dan menerapkan asuransi (Kim, Jeon, Kim, & Heo, 2008, p. 15). Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menyebabkan peningkatan pada ekonomi Korea Selatan.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Kim Young Sam telah merubah tata kelola keuangan dari yang sebelumnya dimana kredit asing tidak secara langsung diserahkan kepada negara, namun dengan perantara bank yang akan digunakan sebagai alat untuk membiayai strategi industrialisasi yang direncanakan negara yang salah satunya menyediakan pinjaman murah untuk perusahaan Chaebol, lebih diarahkan kepada investasi asing secara langsung dan merubah fokus dari strategi sebelumnya yang mengarah pada pembangunan dan proteksi pada industri domestik, lebih diarahkan kepada strategi *segyewa* atau globalisasi yang lebih memfasilitasi globalisasi ekonomi Korea Selatan. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan dapat membantu kebutuhan hubungan Chaebol untuk mengekspansi perusahaannya (Kalinowski & Cho, 2009, pp. 6-7).

Tahun 1997 merupakan tahun yang cukup dramatis bagi perekonomian Asia. Nilai tukar mata uang asing telah melonjak tinggi di negara-negara Asia Tenggara, dan

diprediksi bahwa krisis ini akan berefek domino pada negara-negara Asia lainnya (Park, 1998, p. 1). Tepatnya pada bulan November 1997, telah terdengar kabar mengenai melonjaknya nilai tukar mata uang asing di Korea Selatan. Nilai tukar mata uang asing yang awalnya bernilai 864 won per dolar, telah melonjak menjadi 1.690 won per dolar pada bulan Desember (Chang, 2003, p. 3). Tidak hanya itu saja, Korea Selatan juga mengalami suku bunga yang naik, pasar saham yang jatuh, dan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, termasuk juga perusahaan Chaebol (Park, 1998, p. 2). Kejadian terburuk yaitu dimana cadangan devisa nasional telah habis menjadi US\$3,8 miliar dan ini dapat mendorong berhentinya perekonomian negara. Hutang luar negeri mencapai US\$150 miliar, hampir empat kali lipat jumlah hutang selama periode 1992-1997 yang hanya US\$40 miliar, dan hampir membuat negara bangkrut (Phil Sang, 2000, p. 5).

Banyak sumber mengatakan bahwa selain efek domino yang membuat ekonomi Korea Selatan mengalami krisis, penyebab lainnya adalah hubungan antara pemerintah dengan bisnis domestik. Hal ini dikarenakan selama ini pemerintah telah memaksa bank untuk menyalurkan pinjaman dana ke beberapa Chaebol, yang kemudian mengakibatkan penumpukan hutang mencapai sekitar 52 miliar dollar. Pemerintah melakukan hal ini dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi Chaebol, akan tetapi banyak Chaebol yang tidak disiplin dan tidak dapat melunasi pinjaman mereka (Park, 1998, p. 3). Sebelumnya, telah banyak pihak mengkritik mengenai intervensi yang dilakukan negara pada Chaebol, selama ini intervensi dianggap terlalu berlebihan dan dikhawatirkan dapat mendorong ekonomi di ambang pada krisis hutang, meningkatkan

masalah ekuitas dan adanya potensi korupsi (Lim, 2003, p. 36). Rupanya kritikan tersebut benar dan terjadilah krisis 1997 di Korea Selatan.

Dengan kejadian krisis finansial 1997 ini, telah membuat hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol cukup renggang. Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah tegas pada hubungannya dengan Chaebol agar krisis serupa tidak akan kembali terjadi di masa depan (Kim K. , 2006, p. 12). Oleh karena itu, pemerintah telah menginstruksikan Chaebol untuk berkonsentrasi pada bisnis inti mereka dan untuk anak perusahaan yang dirasa tidak memberikan keuntungan dianjurkan untuk ditutup agar tidak menimbulkan masalah baru, pemerintah juga membiarkan hampir setengah dari Chaebol yang dirasa sudah tidak dapat dipertahankan mengalami kebangkrutan atau berada dibawah kekuasaan asing. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk merubah tata aturan bank dalam memberikan pinjaman pada Chaebol, seperti penentuan batas kredit macet dari masa tunggakan 6 bulan dan telah disesuaikan dengan standar nasional menjadi 3 bulan. Dalam hal ini, Chaebol dituntut untuk lebih tertib dalam mentaati aturan bank, karena selama ini dengan adanya dukungan yang diberikan pemerintah kepadanya, membuat Chaebol terlalu mengentengkan aturan tata tertib dalam pinjaman dana bank (Kim K. , 2006, p. 15).

Lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan juga memutuskan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan karena selama ini telah banyak menjadi perdebatan mengenai tata kelola perusahaan Chaebol, terlebih lagi selama ini masih kurang adanya transparansi antara perusahaan Chaebol dengan pemerintah, sehingga dengan sistem

ini diharapkan perusahaan menjadi lebih efisien dan tertata. Beberapa rencana restrukturisasi ekonomi adalah sebagai berikut;

Tabel 2.3 Rencana Tata Kelola dan Restrukturisasi Perusahaan Korea

Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengharuskan adanya laporan keuangan perusahaan untuk dipersiapkan • Menerapkan proses audit berdasarkan standar internasional • Mengharuskan adanya publikasi laporan keuangan gabungan untuk perusahaan asosiasi • Mengurangi penggunaan jaminan timbal balik oleh afiliasi/anak perusahaan
Restrukturisasi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mangadopsi <i>Corporate Restructuring Promotion Law</i> (berlaku hingga 2005), undang-undang ini berisi tentang meniadakan institusi atau perusahaan yang menimbulkan masalah pada ekonomi • Memastikan bahwa semua restrukturisasi bersifat sukarela dan berorientasi pasar • Mengharuskan adanya izin persetujuan dalam pengambil-alihan perusahaan Korea oleh asing • Manaikkan batas kepemilikan saham yang dapat diperoleh orang asing dari 10% menjadi 33%

Sumber: (Sohn C. , 2002, pp. 30-35)

Dengan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah, Korea Selatan telah berhasil membangkitkan kembali ekonomi negaranya. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mengembalikan posisi perekonomian negara, salah satunya mengembalikan kepercayaan pasar dan kembali menarik investor untuk berinvestasi di Korea Selatan. Keberhasilan Korea Selatan yang cepat dalam memulihkan kondisi dari

krisis ekonomi 1997 ini banyak mendapatkan pujian dari berbagai pihak seperti IMF, World Bank, dan beberapa ekonom (Kalinowsk, 2008, p. 448). Berikut ini merupakan tabel data kenaikan investor asing yang kembali berinvestasi di Korea Selatan pasca krisis finansial 1997;

Tabel 2.4 Data Investasi Asing di Korea Selatan

	Total Investasi Asing	Investor Asing Individu
Mei 1997	23	6
November 1997	26	7
12 Desember 1997	50	50
30 Desember 1997	55	50
Mei 1998	100 (liberalisasi secara penuh)	100 (liberalisasi secara penuh)

Sumber: (Akama, Noro, & Tada, 2003, p. 7)

Dengan data diatas, maka dapat dilihat kenaikan investasi Asing di Korea Selatan setelah adanya kejadian krisis finansial tahun 1997. Kenaikan jumlah investasi asing ini sangatlah berarti untuk Korea Selatan. Perlu diketahui, bahwa sebelumnya dengan kondisi pada saat krisis, banyak investor yang kehilangan kepercayaan untuk tetap berinvestasi di Korea Selatan karena adanya ketakutan akan kerugian pada bisnis mereka. Adanya ketakutan tersebut telah membuat banyak dari mereka yang memutuskan untuk berpindah investasi ke negara lain. Dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonominya, para investor kembali percaya untuk berinvestasi di Korea Selatan, bahkan dengan jumlah yang terus meningkat.

2.2 Dinamika hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol

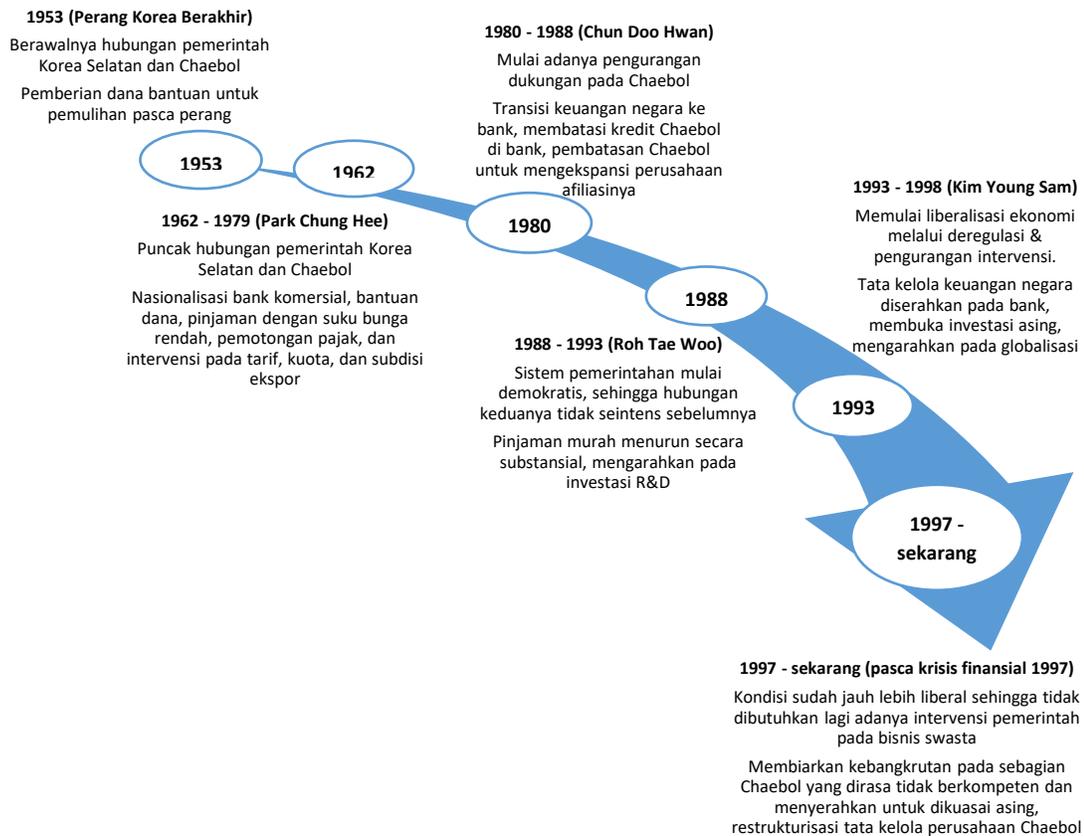
Membahas mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol, status hubungan yang terjalin antara keduanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin negara yang sedang berkuasa, hal ini menyebabkan hubungan keduanya dapat berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintahan yang memimpin atau mengalami pasang surut. Namun, meskipun telah banyak mengalami perubahan hubungan pada setiap pemerintahan, selama ini hubungan keduanya tetap terjalin dengan erat. Menurut Phil Sang, selama ini belum ada rezim politik yang tidak menjaga hubungannya dengan Chaebol karena keduanya memiliki hubungan yang saling tergantung satu sama lain, baik untuk kebutuhan ekonomi maupun politik (Phil Sang, 2000, p. 4).

Berakhirnya peristiwa perang Korea merupakan awal mula dari hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Pada masa awal tersebut, hubungan keduanya sangatlah harmonis, terlihat bagaimana pemerintah telah mempercayai Chaebol dan memutuskan untuk memberikan dana bantuan dan pinjaman murah pada perusahaan bisnis keluarga tersebut. Terlebih lagi pada masa kepemimpinan Park Chung Hee, dimana ekonomi Korea Selatan telah masuk pada masa kebangkitannya berkat hubungan harmonis dengan Chaebol. Park telah mengintervensi pasar dan memperlakukan Chaebol dengan sangat spesial, hingga membuat kekhawatiran pada rakyat akan adanya praktek buruk diantara keduanya (Tejada, 2017). Seiring dengan adanya pergantian pemerintahan, hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol juga mengalami perubahan. Beberapa perubahan yang sangat dirasakan

diantaranya yaitu dimana pemerintah secara bertahap telah mengurangi porsi dalam mengintervensi pasar dan juga dalam pemberian dana pinjaman pada Chaebol yang telah diserahkan kepada bank (Mah, 20017).

Perubahan pada hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol paling terasa yakni setelah adanya peristiwa krisis finansial tahun 1997. Peristiwa krisis finansial ini merupakan sebuah peringatan karena sikap pemerintah selama ini yang terlalu memberikan perhatian lebih kepada Chaebol, namun justru membuat kondisi Korea Selatan terpuruk karena sikap tidak disiplin yang dimiliki sebagian Chaebol (Park, 1998, p. 3). Selain itu, perubahan pada hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol setelah krisis finansial 1997 juga dipengaruhi oleh kondisi global yang seiring berjalannya waktu negara-negara di dunia semakin terbuka terhadap satu sama lain, termasuk Korea Selatan.

Berbeda dengan sebelumnya yang cenderung menutup diri dari adanya campur tangan asing, saat ini Korea Selatan sudah jauh lebih terbuka. Dengan begitu, ekonomi Korea Selatan yang sebelumnya sangat tergantung dengan adanya intervensi dari pemerintah, maka saat ini sudah lebih liberal karena perusahaan tidak hanya bisa mendapatkan modal dari pemerintah saja, namun bisa mendapatkannya dari asing dan juga dengan cara membuka investasi (Akama, Noro, & Tada, 2003, p. 7). Hal ini membuat hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol tidak seintens seperti sebelumnya, namun hubungan keduanya tetap terjalin erat dan akan terus berlangsung, karena keduanya memiliki kepentingan dan peranan yang penting.



Sumber: penulis

2.3 Kondisi dan Respon Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi

Pada penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan, terdapat 2 pihak yang terkena dampak yakni pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai kondisi dan respon Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok;

2.3.1 Pemerintah Korea Selatan

Menanggapi keputusan Korea Selatan untuk memasang THAAD di negaranya membuat Tiongkok memutuskan untuk menerapkan sanksi pembalasan. Tiongkok

telah memblokir akses barang dan jasa yang berasal dari Korea Selatan di berbagai sektor, seperti; pada sektor hiburan dan budaya dengan melarang penampilan artis Korea Selatan dan program acara yang menampilkan tentang Korea; sektor pariwisata dengan melarang agen travel membuka destinasi ke Korea Selatan dan; pada sektor bisnis dengan memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan yang berada disana.

Akibat adanya kejadian ini Korea Selatan telah mengalami kerugian yang cukup besar pada perekonomiannya. Menurut laporan yang dirilis oleh *South Korea Hyundai Research Intitute*, pada tahun 2017 saja kerugian yang harus ditanggung mencapai US\$7.5 milyar dan kerugian ini setara dengan 0,5 persen dari PDB negara hingga akhir tahun 2017. Pada sektor industri hiburan dan budaya, kerugian terjadi karena telah mengalami penurunan surplus yang mencapai 23,2% atau setara dengan US\$54,3 juta. Sektor yang paling menderita akibat sanksi Tiongkok ini adalah sektor pariwisata, *South Korea Hyundai Research Intitute* menyatakan bahwa jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Korea Selatan telah menyusut hingga 40% antara bulan April hingga Desember 2017, total kerugiannya mencapai US\$6,3 milyar. Total dari kerugian sektor pariwisata ini mencapai 84% dari total kerugian Korea Selatan akibat sanksi Tiongkok pada tahun 2017 (China Daily, 2017).

Menanggapi hal ini pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melaporkannya kepada WTO karena langkah Tiongkok ini dirasa telah melanggar beberapa perjanjian perdagangan, namun solusi yang didapatkan adalah adanya konsultasi antara 2 belah pihak. Untuk itu, pihak Korea Selatan telah berupaya untuk bertemu pihak Tiongkok agar permasalahan ini cepat terselesaikan seperti pada sela-

sela pertemuan “*G20 Hamburg Summit*” di Jerman. Upaya ini ternyata gagal karena Tiongkok menolak permintaan untuk bertemu dengan berbagai alasannya (Kim & Chung, 2017). Tidak hanya itu saja, Amerika yang merupakan negara pemilik teknologi THAAD juga turut serta dalam meyakinkan Tiongkok. Amerika telah mencoba mengundang Tiongkok untuk melakukan pembicaraan teknis, akan tetapi undangan tersebut tetap saja di tolak (Panda, 2017) Selain itu, Korea Selatan dan Amerika juga terus mencoba untuk meyakinkan Tiongkok bahwa satu-satunya tujuan dari sistem THAAD adalah mempertahankan kawasan dari adanya ancaman rudal milik Korea Utara yang terus meningkat, tanpa adanya unsur tujuan lainnya (Kim & Chung, 2017).

Pemerintah Korea Selatan secara terus menerus melakukan pendekatan pada pihak Tiongkok agar permasalahan ini cepat terselesaikan, hingga akhirnya terjadilah pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dengan Presiden Xi Jinping dalam sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* yang dilaksanakan di Vietnam pada pertengahan bulan November 2017. Pada pertemuan tersebut, Moon Jae-in dan Xi Jinping mencoba untuk terbuka mengenai apa yang menjadi permasalahan utama pada kejadian ini. Xi Jinping telah menjelaskan bahwa yang selama ini ditakutkan oleh negaranya adalah dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan dapat mengurangi kemampuan rudal miliknya dalam melakukan serangan nuklir dalam perang melawan Amerika Serikat karena tentunya hal ini sangat merugikan posisinya.

Dengan adanya pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dan Presiden Xi Jinping ini maka secara tidak langsung keduanya telah mengkonfirmasi kembalinya hubungan

kerjasama antara Korea Selatan dengan Tiongkok, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Korea Selatan kepada CNBC;

"Both sides shared the view that the strengthening of exchange and cooperation between Korea and China serves their common interests and agreed to expeditiously bring exchange and cooperation in all areas back on a normal development track" (CNBC , 2017)

Pernyataan tersebut menyatakan kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa penguatan kerjasama antara Korea Selatan dan Tiongkok adalah kepentingan bersama dan ingin mempercepat kembalinya hubungan keduanya. Pihak Tiongkok juga telah menegaskan bahwa kedua negara telah sepakat untuk mengembalikan hubungan mereka kembali normal *"at an early date"*. Adanya konfirmasi tersebut juga telah membuat penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan telah berangsur membaik, hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan bahwa pada awal bulan Oktober, Korea Selatan dan Tiongkok telah menyetujui untuk memperbarui swap mata uang sebesar US\$56 miliar dan maskapai penerbangan Tiongkok dilaporkan berencana membuka kembali rute penerbangan ke Korea Selatan (CNBC , 2017).

2.3.2. Chaebol

Selain pemerintah Korea Selatan, terdapat pihak lain yang juga terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok, pihak lain tersebut adalah Chaebol. Seperti yang dijelaskan pada sub sub-bab sebelumnya, Tiongkok telah memblokir akses barang dan jasa Korea Selatan di berbagai sektor termasuk pada sektor bisnis yakni dengan memboikot produk dan perusahaan yang berasal dari Korea Selatan di pasar Tiongkok.

Selama ini Tiongkok merupakan negara pasar terbesar bagi produk dan perusahaan Korea Selatan, sehingga terdapat banyak perusahaan dari Korea Selatan yang beroperasi di Tiongkok seperti halnya Chaebol. Beberapa perusahaan besar milik Chaebol yang beroperasi di Tiongkok antara lain seperti Lotte Group, Samsung Group, Kia Motor, LG Group, Hyundai Motor, SK Group, dan lainnya. (China Daily, 2014).

Dari banyaknya Chaebol yang beroperasi di Tiongkok dan terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, Lotte Group merupakan salah satu pihak Chaebol yang terkena dampak signifikan. Hal ini berawal dari keputusan Lotte Group yang menyerahkan lahan golfnya di wilayah Seongju untuk ditukarkan dengan pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai lokasi penempatan THAAD. Keputusan Lotte Group ini dianggap sebagai pengkhianatan kepada Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok memberikan sanksi pembalasan kepada perusahaan Lotte Group dengan cara menerapkan boikot pada produk-produk Lotte Group termasuk Lotte Mart dan Lotte Duty Free.

Dalam menerapkan sanksi pembalasannya kepada Lotte Group, pada bulan Maret pemerintah Tiongkok telah memerintahkan Lotte Group untuk menutup sementara gerainya, dengan keputusan ini setidaknya Lotte Group diprediksi akan kehilangan kurang lebih 300 miliar won (US\$263,97 juta). Pada bulan Mei, dari 99 total gerai milik Lotte Group yang berada di Tiongkok, 74 telah ditutup secara paksa oleh pihak berwajib dengan alasan inspeksi kebakaran dan keamanan, dan 13 gerai milik Lotte Group lainnya ditutup sementara karena adanya protes anti-Korea oleh warga. Selain itu, hampir 90% outlet milik Lotte Group tidak beroperasi kembali, sementara 12

sisanya tetap beroperasi namun harus berjuang dalam mendapatkan pelanggan (Hee, 2017).

Melihat kondisi perusahaannya yang semakin menurun akibat kesalahpahaman Tiongkok, membuat CEO Lotte Group yakni Shin Dong-bin melakukan pembelaan yang dimuat oleh CNN;

“I think there’s a lot of misunderstandings about our position, and we have nothing to do with the missile deployment. I would like to explain that Lotte would ultimately have had no choice because it was a matter of national security”- Shin Dong-bin (Mullen & Hancocks, 2017)

Pernyataan tersebut memuat pernyataan CEO Shin Dong-bin bahwa Lotte Group telah menerima banyak kesalahpahaman mengenai hubungannya dengan penempatan THAAD. Shin Dong-bin menjelaskan bahwa dalam kasus ini perusahaannya tidak dapat menolak permintaan penukaran lahan dengan pemerintah, terlebih lagi perintah ini merupakan upaya dalam menjaga keamanan nasional, sehingga apa yang dilakukan Lotte Group bukanlah sebuah kesalahan. Pihaknya telah mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengan pejabat pemerintah di Tiongkok sekaligus mencoba mengadakan beberapa pertemuan dengan duta besar Tiongkok di Korea Selatan untuk membahas situasi ini, namun upaya ini ternyata tidak membuahkan hasil. Meskipun begitu, pihak Lotte Group berharap bahwa permasalahan ini akan segera dapat diselesaikan (Mullen & Hancocks, 2017).

Hingga bulan April 2017, pihak Lotte Group tidak berencana untuk menarik kembali pasar mereka di Tiongkok karena berharap bahwa permasalahan ini akan segera dapat diselesaikan. Akan tetapi, kondisi yang tidak kunjung membaik selama

lebih dari 6 bulan membuat Lotte Group dan perusahaan lain semakin frustrasi karena semakin permasalahan ini berlarut-larut maka akan semakin sulit untuk kembali memenangkan pelanggan di Tiongkok. Oleh karena itu, pada bulan September terdengar kabar bahwa Lotte Group berencana akan menjual sahamnya yang berada di unit Tiongkok (Kim S. , 2017). Namun dengan adanya konfirmasi mengenai kembalinya hubungan kerjasama antara Korea Selatan dengan Tiongkok setelah bertemunya kedua pemimpin negara, tentunya Lotte dapat mengkaji kembali rencananya ini.

BAB III

ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK ATAS PENEMPATAN THAAD 2016-2017

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai pola hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol, diketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol telah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan atas penurunan intensitas pada hubungan keduanya dan yang paling terasa yakni setelah adanya peristiwa krisis finansial tahun 1997. Pada bab sebelumnya juga dapat dilihat bagaimana kondisi dan respon pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menanggapi adanya sanksi yang diterapkan oleh Tiongkok atas penolakannya terhadap penempatan THAAD. Sehingga dalam bab ini penulis akan menganalisis hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Penulis akan membagi pembahasan menjadi 3 sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas mengenai lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Sub-bab kedua akan membahas mengenai karakteristik dari konsep *state-business relations*. Sub-bab ketiga akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan sanksi atas penempatan THAAD antara Korea Selatan dengan Tiongkok.

3.1 Lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Lotte Group

Dalam konsep *State-Business Relations* terdapat istilah *lobbying* atau melobi. Aktivitas melobi ini dilakukan pada setiap pemerintahan, baik otoriter ataupun demokratis, dan oleh beberapa aktor. Pada pemerintahan, aktivitas ini sering disebut dengan diplomasi. Aktivitas ini dijalankan dengan metode yang beragam dengan tujuan mencapai lingkungan yang menguntungkan bagi pemerintah dan apa yang menjadi kepentingannya dapat terpenuhi. Pada perusahaan aktivitas melobi dilakukan untuk mempengaruhi otoritas pemerintah dalam mempertimbangkan pandangan dan kepentingan pribadi pada saat memutuskan kepentingan publik dan membuat peraturan tentangnya. Sama halnya dengan pemerintah, aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang menguntungkan bagi pihak bisnis dan merupakan bagian dari strategi perusahaan bisnis untuk kepentingan komersial. Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penempatan THAAD ini, pemerintah Korea Selatan dan Chaebol telah melakukan aktivitas melobi. Berikut ini adalah aktivitas melobi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Chabeol;

3.2.1 Lobi pemerintah Korea Selatan kepada Lotte Group

Pemerintah Korea Selatan diketahui telah melakukan lobi kepada Lotte Group pada saat merencanakan penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Lobi yang dilakukan oleh pemerintah ini memiliki tujuan agar Lotte Group bersedia melakukan *Land-Swap* atau menukarkan lahan golfnya yang berada di wilayah Seongju untuk digunakan menjadi lokasi penempatan THAAD. Pemerintah Korea Selatan berusaha

untuk melakukan lobi ini karena lahan di wilayah Seongsan-ri yang seharusnya menjadi lokasi awal penempatan THAAD dinilai kurang aman oleh militer Amerika. Hal ini karena lokasi di Seongsan-ri hanya berjarak sekitar 1,5 km dari wilayah pemukiman warga, sehingga dapat membahayakan warga setempat karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar (Ahn, 2016). Oleh sebab itu, kementerian pertahanan Korea Selatan dibantu oleh militer Amerika bergegas mencari lokasi yang dirasa aman dan strategis. Pada akhirnya, keduanya berhasil menemukan lokasi tersebut yang ternyata adalah lahan golf milik Lotte Group di wilayah Seongju. Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan Ryu Ju-Seung menyatakan bahwa wilayah Seongju terpilih untuk dijadikan lokasi penempatan THAAD karena dapat memaksimalkan keefektifan sistem tersebut dan juga telah memenuhi standar lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (CBS News, 2016).

Menanggapi lobi yang dilakukan pemerintah Korea Selatan, Lotte Group mengalami dilema karena dihadapkan dengan pilihan sulit. Apabila Lotte Group memutuskan untuk menyetujui kesepakatan penukaran lahan dengan pemerintah, maka hal ini akan membahayakan posisi pasarnya di Tiongkok. Namun disisi lain, perlu diketahui bahwa pada saat itu juga ketua Lotte Group yakni Shin Dong-bin sedang berada dalam masalah dimana dirinya dituduh melakukan penggelapan dan pelanggaran kepercayaan bernilai jutaan dolar AS, selain itu Lotte Group juga sedang mengalami masalah dimana terdapat beberapa lisensi toko bebas bea miliknya yang ditahan karena diduga terlibat dalam skandal kasus korupsi yakni menyumbang jutaan

dolar ke yayasan yang dikendalikan oleh Choi Soon-sil yang merupakan orang kepercayaan Park Geun-hye (Xinhua, 2017).

Melihat kondisi yang seperti ini, pada tanggal 28 Februari 2017 dewan pihak Lotte Group memutuskan untuk memilih menandatangani perjanjian pertukaran lahan secara resmi bersama dengan militer Korea Selatan, seperti yang dikutip oleh Mail Online;

"We received a message that the board approved the exchange of land for THAAD deployment," (AFP, 2017)

Dengan kesepakatan ini, maka Lotte Group telah setuju untuk menyerahkan lahan golfnya yang senilai US\$79 juta atau 89 milyar won diganti dengan properti milik militer Korea Selatan yang berada di Namyangju, provinsi Gyeonggi (Choi, 2017).

Pembahasan mengenai lobi pemerintah Korea Selatan kepada Lotte Group ini, terdapat sesuatu yang menarik. Telah beredar kabar bahwa berselang sehari sebelum Lotte Group menandatangani perjanjian pertukaran lahan tersebut, surat perintah atas penangkapan ketua Lotte Group Shin Dong-bin telah dibatalkan oleh pengadilan Seoul. Selain itu, Lotte Group juga diketahui kembali mendapatkan lisensi toko bebas bea miliknya meskipun terlibat dalam skandal korupsi yang menyebabkan impeachment Presiden Park Geun-hye (Xinhua, 2017). Beredarnya kabar ini membuat banyak warga Korea Selatan berasumsi bahwa adanya kesepakatan pertukaran lahan antara pemerintah Korea Selatan dengan Lotte Group dilakukan sebagai imbalan untuk mengembalikan lisensi toko bebas bea milik Lotte Group. Selain itu juga terdapat asumsi warga bahwa pertukaran itu disetujui agar menghentikan penangkapan CEO Lotte Group Shin Dong-bin.

3.2.2 Lobi Lotte Group kepada pemerintah Korea Selatan

Melihat keadaan perusahaannya di Tiongkok yang tidak kunjung membaik karena adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan dan usaha pendekatannya dengan pihak Tiongkok yang tidak pernah berhasil, membuat para eksekutif Lotte Group memutuskan untuk mengadakan pertemuan pada Maret 2017. Dalam pertemuan eksekutif Lotte Group tersebut, dibahas mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi Lotte Group di Tiongkok pasca penerapan sanksi atas penempatan THAAD, selain itu para eksekutif juga mencari cara untuk mempertahankan perusahaannya yang berada di Tiongkok dan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hasil dari pertemuan ini, para eksekutif Lotte Group menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri dan memutuskan akan melobi pemerintah Korea Selatan secara resmi agar dapat membantu pihaknya (Mullen & Han, 2017).

Para eksekutif Lotte Group memutuskan melobi pemerintah untuk melakukan intervensi permasalahan ini secara diplomatik, perdagangan dan industri (Sohn I. , 2017). Selain itu Lotte Group menginginkan pemerintah untuk membantu menjelaskan kepada Tiongkok bahwa keputusannya untuk menandatangani kesepakatan penukaran lahan untuk penempatan THAAD dilakukan atas permintaan pemerintah dan merupakan upaya dalam menjaga keamanan nasional. Lotte Group juga menginginkan pemerintah untuk mengingatkan pihak Tiongkok mengenai kontribusinya selama ini terhadap ekonomi Tiongkok, termasuk Lotte Group yang telah memperkerjakan hampir 20 ribu pekerja Tiongkok. Keputusan Lotte Group melobi pemerintah ini

merupakan upaya yang dilakukan pihaknya untuk mencari bantuan pemerintah dan hal ini bukan hanya untuk pihaknya sendiri saja tetapi juga untuk perusahaan Korea Selatan lainnya yang ikut merasakan dampak dari sanksi yang dilakukan Tiongkok atas penempatan THAAD (KBS World, 2017). Dengan lobi yang dilakukan Lotte Group kepada pemerintah Korea Selatan ini, diharapkan dapat mengembalikan keadaan pasar Lotte Group dan perusahaan lainnya di Tiongkok seperti sedia kala.

Pemerintah Korea Selatan selama ini telah berusaha membantu pihak bisnis dengan mencoba berdialog dengan pihak Tiongkok, namun upaya ini rupanya belum juga berhasil. Sehingga untuk membantu meringankan dan mengurangi beban Chaebol, pada September 2017 pemerintahan Moon Jae-in mengambil keputusan yakni rencana untuk memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, seperti yang dikutip oleh reuters;

“The government may announce additional measures to ease the pain later on, but it would be unrealistic to expect relief for a specific company,” (Kim & Jin, 2017)

Pemerintah berencana akan menawarkan konsesi pajak dan memberikan pinjaman. Selain itu pemerintah berencana untuk mengizinkan perusahaan yang beroperasi di Tiongkok untuk menanggungkan semua atau sebagian dari pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan mereka hingga sembilan bulan kedepan (Kim & Jin, 2017). Tidak hanya itu saja, pemerintah juga telah meningkatkan dana kebijakan bank sebesar US\$437,14 juta atau setara dengan 500 milyar won untuk membantu perusahaan yang terkena dampak, namun untuk Lotte Group sendiri bantuan ini

ditiadakan. Dana tersebut akan lebih diarahkan kepada perusahaan yang menjadi pemasok dan pembuat komponen mobil yang bergantung pada penjualan Hyundai dan Kia motor. Hal ini karena penjualan Hyundai Motor Co. telah mengalami penurunan pada pasar mobilnya di Tiongkok sebesar 29%, sehingga pemerintah tidak ingin perusahaan pembuat komponen ikut berlarut terkena dampaknya (Kim C. , 2017).

3.2 Karakteristik *State-Business Relations*

Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol memiliki hubungan yang baik antara satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintahan Moon Jae-in kepada pihak Chaebol untuk membantu meringankan beban karena adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD. Untuk itu penulis akan melihat kesesuaian antara hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menyelesaikan permasalahan THAAD dengan konsep *State-Business Relations*. Dalam sub-bab ini, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan karakteristik *State-Business Relations* untuk melihat kesesuaian penyelesaian masalah dengan konsep yang digunakan. Berikut ini adalah analisis permasalahan menggunakan karakteristik *State-Business Relations*;

3.2.1 Transparansi

Dalam hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan bisnis, dibutuhkan adanya transparansi. Transparansi disini merupakan adanya pertukaran informasi yang akurat dan terpercaya antara pemerintah dan Chaebol. Dengan adanya transparansi antara

pemerintah dan Chaebol maka diharapkan dapat membantu memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan Chaebol dapat terpenuhi dengan adanya tindakan ataupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sen, 2015, p. 11).

Pada kasus hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD ini, transparansi informasi telah diberikan Chaebol kepada pihak pemerintah Korea Selatan. Pihak Chaebol, terutama Lotte Group telah melaporkan bagaimana dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD ini sangat berpengaruh pada perusahaannya dan perusahaan Korea Selatan lainnya yang berada di Tiongkok. Lotte Group melaporkan bahwa telah terjadi penurunan tajam pada penjualannya, bahkan Lotte Group diharuskan untuk menutup 74 gerainya dengan berbagai alasan yang diberikan oleh pihak Tiongkok.

Adanya transparansi informasi yang diberikan oleh pihak Chaebol ini telah membantu pemerintah Korea Selatan untuk menetapkan keputusan apa yang sesuai dengan kebutuhan pihak Chaebol. Melihat banyak perusahaan Korea Selatan yang mengalami penurunan pada pasarnya di Tiongkok akibat adanya sanksi, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk membantu dengan memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terkena dampak. Pemerintah telah menawarkan konsesi pajak dan memberikan pinjaman, selain itu pemerintah juga berencana untuk mengizinkan perusahaan yang beroperasi di Tiongkok untuk menanggungkan semua atau sebagian dari pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan mereka hingga sembilan bulan.

3.2.2 Timbal Balik

Timbal balik merupakan elemen yang penting dalam hubungan negara dan bisnis. Apabila terdapat bantuan atau subsidi yang diberikan pemerintah kepada sektor bisnis, maka pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa sektor bisnis yang mendapatkan bantuan tersebut mampu menggunakannya dengan produktif dan akan menghasilkan timbal balik yang baik (Sen, 2015, p. 10).

Keputusan Presiden Moon Jae-in untuk membantu Chaebol dalam menghadapi masalah sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD merupakan sesuatu yang cukup menyita perhatian. Hal ini karena sejak masa kampanye, Moon Jae-in telah berjanji untuk mereformasi tata kelola Chaebol dan menghapuskan hubungan kolusi antara politik dan bisnis. Janji Moon Jae-in ini juga disampaikan dalam pengukuhanannya di Majelis Nasional Korea Selatan pada 10 Mei 2017, seperti yang dikutip oleh the Diplomat;

“Under the Moon Jae-in government, politics-business connections will disappear... I will lead [the] reform of chaebol.” (Fensom, 2017)

Dengan adanya janji Moon Jae-in untuk mereformasi Chaebol tersebut, terdapat banyak pihak merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintahan Moon Jae-in pada Chaebol untuk menghadapi masalah sanksi Tiongkok merupakan hal yang tidak sesuai dengan janjinya.

Menanggapi permasalahan ini, seorang kritikus mengatakan bahwa janji Moon Jae-in mengenai reformasi yang akan ia terapkan pada Chaebol telah dikesampingkan,

hal ini karena pemerintah memfokuskan perhatiannya pada perdamaian dengan Korea Utara, seperti yang dikutip oleh CNBC;

"President Moon is dependent on chaebols for economic cooperation between the two Koreas so given the circumstances, I don't think it's realistic to expect any fundamental reform of chaebols," - Sangin Park (Chandran, 2018)

Kerjasama ekonomi adalah elemen utama untuk menerapkan inisiatif perdamaian dengan Korea Utara dan Chaebol memainkan peranan yang penting dalam bidang tersebut. Investasi dari Chaebol akan sangat penting untuk membangun hubungan transportasi antar Korea dan revitalisasi kawasan industri di wilayah perbatasan Kaesong (Chandran, 2018).

Selain untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, Chaebol juga berpotensi memiliki peran signifikan untuk meremajakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang masih sangat kurang, karena terbukti tingkat pengangguran mencapai tingkat tertinggi selama satu dekade pada bulan Agustus lalu. Dengan peranan yang dimiliki Chaebol untuk berhubungan dengan Korea Utara dan membantu meningkatkan lapangan pekerjaan ini, maka sangat mungkin Presiden Moon Jae-in saat ini melihat Chaebol bukan sebagai subjek reformasi, tetapi sebagai mitra yang sangat diperlukan (Chandran, 2018).

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa langkah pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Chaebol pasca adanya sanksi Tiongkok bukanlah tanpa alasan. Pemerintah mengharapkan adanya timbal balik dari adanya bantuan tersebut yaitu peranan Chaebol untuk ikut berinvestasi di Korea Utara dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah merasa bahwa peranan Chaebol sangat

diperlukan sebagai mitra untuk mencapai inisiatif Presiden Moon Jae-in dalam membangun hubungan baik dengan Korea Utara dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

3.2.3 Menjaga Kredibilitas Negara di antara Pebisnis

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan kredibilitas yakni kredibilitas negara dalam menjaga komitmennya. Komitmen yang kredibel terhadap kebijakan, kesepakatan dan penerapan aturan adalah atribut yang penting dalam hubungan negara dan bisnis. Apabila negara tidak menegakkan komitmen terhadap kebijakan, kesepakatan, dan penerapan aturan yang dibuatnya maka hal ini akan membuat adanya rasa tidak percaya pihak bisnis kepada pemerintah dan akan mengarah kepada investasi yang menderita. Keputusan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pihak bisnis tentunya bukanlah keputusan yang mudah, namun dalam membuat keputusan tersebut negara perlu membuat komitmen bahwa apa yang menjadi keputusannya tidak akan berubah, seperti merubah kebijakan, mengingkari kesepakatan, ataupun peraturan (Sen, 2015, p. 9).

Untuk menjaga kredibilitas komitmen terhadap kebijakan, kesepakatan dan penerapan aturan, selama ini pemerintah Korea Selatan adalah salah satu contoh pemerintahan yang dapat menjaganya, terbukti dengan masih adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan bisnis hingga saat ini, termasuk pada pemerintahan Moon Jae-in. Telah diketahui bahwa yang menjadi motif Moon Jae-in dalam memberikan bantuan pada Chaebol untuk menghadapi masalah sanksi Tiongkok adalah menjadikan

Chaebol sebagai mitra untuk mencapai inisiasinya membangun hubungan baik dengan Korea Utara dan menciptakan lapangan kerja di Korea Selatan.

Demi menjaga kredibilitas komitmen atas kebijakan yang diambilnya ini, Moon Jae-in baru-baru ini membuktikan komitmennya dalam berhubungan baik dengan Chaebol. Dalam kunjungan tiga harinya ke Pyongyang pada pertengahan September 2018, Moon Jae-in diketahui ditemani oleh rombongan para pemimpin bisnis Korea Selatan, beberapa diantaranya yaitu Lee Jae-yong yang merupakan pewaris bisnis Samsung Electronics, Koo Kwang-mo ketua LG Corp, Chey Tae-Won ketua SK Group, Kim Young-hwan wakil ketua Hyundai Group, dan lain sebagainya (Song, 2018). Lee dan rombongan lainnya diketahui telah bertemu dengan Ri Ryong-nam yang merupakan wakil perdana menteri Korea Utara untuk urusan ekonomi (Suzuki, 2018).

Usaha Moon Jae-in untuk mengikutsertakan para pemimpin bisnis pada kunjungannya ke Pyongyang ini, selain untuk menjaga kredibilitas komitmen atas keputusannya berhubungan baik dengan Chaebol, Moon Jae-in juga melakukannya untuk pendekatan dengan Korea Utara. Presiden Moon Jae-in percaya bahwa dengan kehadiran para pemimpin bisnis dalam pertemuan tersebut akan membantu prospek investasi bisnis Korea Selatan di Korea Utara dan hal ini akan membantu meyakinkan Pyongyang untuk merealisasikan denuklirisasi (Suzuki, 2018). Selain itu, menurut analisis dari *Samsung Securities*, apabila Korea Selatan menggabungkan kekayaan dan industrialisasinya dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam Korea Utara, hal ini akan membuat lompatan jangka panjang terhadap ekonomi kedua negara.

3.2.4 Membangun Tingkat Kepercayaan Tinggi antara Pemerintah dan Swasta

Kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta adalah salah satu yang terpenting dari hubungan pemerintah dan bisnis. Menurut literatur, kepercayaan ini merupakan faktor kontribusi penting untuk kredibilitas tindakan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dan pernyataan pemerintah akan lebih kredibel ketika adanya kepercayaan antara keduanya (Sen, 2015, p. 9).

Sejak masa kampanyenya, Moon Jae-in merupakan sosok yang anti Chaebol dan menganggap bahwa Chaebol merupakan pihak dengan kejahatan yang mengakar pada ekonomi Korea Selatan. Oleh sebab itu, Moon Jae-in menjanjikan bahwa pada pemerintahannya ia akan mereformasi tata kelola Chaebol dan menghapuskan hubungan kolusi antara politik dan bisnis. Adanya pernyataan ini telah menunjukkan bahwa Moon Jae-in tidak memiliki rasa percaya kepada Chaebol. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sikap Moon Jae-in terhadap Chaebol mulai melunak, hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan dari pemerintahannya kepada Chaebol untuk mengurangi adanya dampak dari sanksi Tiongkok.

Rasa percaya Moon Jae-in terhadap Chaebol terus meningkat, terlebih lagi dengan adanya kebijakan Moon Jae-in yang menginisiasi perdamaian dengan Korea Utara. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa untuk mendukung inisiasi perdamaian Korea Selatan dengan Korea Utara, Moon Jae-in diketahui telah menggandeng para pebisnis termasuk Chaebol untuk berinvestasi di Korea Utara. Tidak hanya berhenti disitu saja, beberapa waktu yang lalu Moon Jae-in diketahui telah mendesak parlemen untuk menyetujui undang-undang yang

memungkinkan Chaebol untuk memiliki saham “*internet bank*” hingga 34 persen dan angka ini 4 persen lebih jauh dari batas atas saat ini (Chandran, 2018).

3.3. Analisis penyelesaian permasalahan sanksi Tiongkok atas Penempatan THAAD antara Korea Selatan dan Tiongkok

Adanya penempatan THAAD di Korea Selatan telah memicu reaksi dari Tiongkok yang kemudian berlanjut dengan adanya sanksi yang diterapkan oleh pihak Tiongkok. Dalam menyelesaikan permasalahan ini penulis akan menggunakan konsep *Issue Linkage* menurut Ernst B. Haas. Konsep ini merupakan cara untuk menawarkan perjanjian oleh dua aktor (negara) dengan melibatkan lebih dari satu isu untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai. Adapun proses *issue linkage* dalam permasalahan ini bermula pada; *Pertama*, pembahasan ini bermula dari Tiongkok yang pada awalnya merasa bahwa dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan akan mengancam isu keamanan pada negaranya. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa isu keamanan merupakan hal pertama yang memulai adanya sanksi. *Kedua*, tidak adanya respon yang diberikan oleh Korea Selatan akhirnya membuat Tiongkok menerapkan sanksi pembalasan yang justru lebih mengarah kepada isu ekonomi, salah satunya yakni dengan memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan di Tiongkok. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Tiongkok menghubungkan isu keamanan dengan ekonomi. Dengan demikian telah terjadi adanya ujicoba dari linker yaitu Tiongkok, terhadap linkee yaitu Korea Selatan.

Ketiga, setelah adanya upaya menghubungkan isu keamanan ke ekonomi, maka Tiongkok menghubungkan kembali ke sektor keamanan. Dalam hal ini Tiongkok telah

menawarkan adanya negosiasi, hingga terjadilah pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dengan Presiden Xi Jinping dalam sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang dilaksanakan di Vietnam pada pertengahan bulan November 2017. Dalam pertemuan tersebut Xi Jinping menawarkan 3 jaminan yang harus di sanggupi oleh Moon Jae-in apabila menginginkan kembalinya rasa percaya Tiongkok pada Korea Selatan dan mencabut sanksi Tiongkok yang diberikan pada Korea Selatan atas penempatan THAAD. 3 jaminan tersebut yakni “*three no’s*” yang berisi antara lain; 1) Korea Selatan tidak akan melanjutkan penempatan THAAD (*no additional THAAD deployment*); 2) Korea Selatan tidak akan mempertimbangkan untuk menggunakan sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat lainnya (*no use of other US missile defense systems*) dan; 3) Korea Selatan tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi Amerika Serikat dan Jepang (*no joining an alliance with US and Japan*) (Panda, 2017).

Dengan adanya tiga jaminan ini menunjukkan bahwa telah terjadi adanya barter kembali, dari isu ekonomi yaitu sanksi pembalasan atas penempatan THAAD kepada isu keamanan yaitu dengan adanya tiga jaminan. Dengan kata lain telah terjadi perjanjian antara Linker dan Linkee. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses penyelesaian pasca sengketa antara dua negara.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik garis besar bahwa Pertama, penempatan THAAD oleh Korea Selatan telah menimbulkan reaksi dari Tiongkok. Kedua, reaksi yang didapat oleh Korea Selatan adalah dalam isu ekonomi. Dari hal ini menunjukkan bahwa adanya pertukaran isu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tiongkok

merupakan Linker dan Korea Selatan adalah Linkee. Ketiga, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Tiongkok menawarkan tiga jaminan dalam isu keamanan, hal ini kemudian disepakati oleh Korea Selatan. Dengan demikian adanya barter isu telah memantik sengketa dan juga menyelesaikan masalah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD telah menyebabkan dampak yang tidak baik pada ekonomi Korea Selatan, termasuk pada Chaebol dan Lotte Group. Dengan adanya dampak ini membuat dibutuhkan hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol untuk menyelesaikannya. Berdasarkan konsep *state-business relations*, penulis telah menganalisis mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dengan melihat lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Lotte Group dan mengimplementasikan karakteristik *state-business relations*. Penulis telah mendapatkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD 2016-2017 dengan studi kasus Lotte Group.

Melihat dari hasil analisis menggunakan lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Lotte Group, maka dapat dikatakan bahwa lobi yang dilakukan Lotte Group agar pemerintah dapat membantu pihaknya dan perusahaan Chaebol lain yang ikut terkena dampak sanksi Tiongkok telah membuahkan hasil. Pemerintah telah berusaha membantu pihak bisnis meringankan dan mengurangi beban Chaebol, dengan memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD. Pemerintah berencana akan menawarkan konsesi pajak dan memberikan pinjaman. Selain itu pemerintah berencana untuk mengizinkan perusahaan yang beroperasi di Tiongkok untuk

menangguhkan semua atau sebagian dari pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan mereka hingga sembilan bulan kedepan. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga telah meningkatkan dana kebijakan bank sebesar US\$437,14 juta atau setara dengan 500 milyar won untuk membantu beberapa perusahaan yang terkena dampak.

Dengan mengimplementasikan 4 karakteristik dari konsep *state-business relations* dalam kasus hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD ini, penulis mendapatkan temuan sebagai berikut;

Tabel 3.1 Implementasi Karakteristik *State-Business Relations*

ASPEK	IMPLEMENTASI
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Chaebol terutama Lotte Group melaporkan dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, sehingga membantu pemerintah untuk menetapkan keputusan yang sesuai dengan yang dibutuhkan Chaebol
Timbal Balik	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Chaebol sebagai mitra untuk mencapai inisiasi berhubungan baik dengan Korea Utara dengan cara berinvestasi • Potensi Chaebol untuk meremajakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan menciptakan lapangan pekerjaan
Menjaga Kredibilitas Negara di antara Pebisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikutsertakan Chaebol pada kunjungan Moon Jae-in di Pyongyang

<p>Membangun Tingkat Kepercayaan Tinggi antara Pemerintah dan Swasta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seiring berjalannya waktu, Moon Jae-in mulai membangun kepercayaan terhadap Chaebol; • Memberikan bantuan pada Chaebol atas dampak sanksi Tiongkok • Menggandeng Chaebol untuk berinvestasi di Korea Utara • Mendesak parlemen menyetujui UU kepemilikan saham “<i>internet bank</i>” hingga 34 persen untuk Chaebol
--	---

Berdasarkan implementasi hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dengan menggunakan karakteristik konsep *state-business relations* ini, maka penulis dapat membuat sebuah gambaran analisa yang deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD ini pemerintah Korea Selatan dan Chaebol telah memiliki hubungan yang efektif sesuai dengan konsep *state-business relations*.

Selain itu penulis juga telah menganalisis penyelesaian permasalahan sanksi Tiongkok atas Penempatan THAAD antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan menggunakan konsep *issue linkage*. Melihat dari implementasi permasalahan, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan ini telah terselesaikan dengan menggunakan konsep *issue linkage*. Penulis menyimpulkan bahwa dengan konsep ini maka didapatkan temuan bahwa; *Pertama*, penempatan THAAD oleh Korea Selatan telah menimbulkan reaksi dari Tiongkok. *Kedua*, reaksi yang didapat oleh Korea Selatan adalah dalam isu ekonomi. Dari hal ini menunjukkan bahwa adanya pertukaran isu.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tiongkok merupakan Linker dan Korea Selatan adalah Linkee. *Ketiga*, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Tiongkok menawarkan tiga jaminan dalam isu keamanan, hal ini kemudian disepakati oleh Korea Selatan. Dengan demikian adanya barter isu telah memantik sengketa dan juga menyelesaikan masalah.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan yang ditemukan seperti cakupan pembahasan masih sangat domestik. Sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih terlihat konteks hubungan internasionalnya, seperti bagaimana hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pasca adanya investasi Chaebol di perbatasan Kaesong. Penulis menyarankan hal ini karena penulis merasa bahwa pembahasan ini masih terbatas dan cukup menarik untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2017, 02 27). *S. Korea's Lotte 'agrees land swap' for US missile system*. Retrieved from Mail Online: <https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4263370/S-Koreas-Lotte-agrees-land-swap-US-missile-system.html>
- Ahn, D. (2016, 07 3). *Seongju in North Gyeongsang chosen as Korea's THAAD location*. Retrieved from Pulse Nawa: <https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2016&no=502889>
- Akama, H., Noro, K., & Tada, H. (2003). *Financial and Corporate Restructuring in South Korea*.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia Next Giant; South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Asia Times. (2017, November 14). *Xi-Moon agree to normalize ties at APEC meeting*. Retrieved from Asia Times: <http://www.atimes.com/article/xi-moon-agree-normalize-ties-apec-meeting/>
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berlinger, J. (2017, December 4). *North Korea's missile tests: What you need to know*. Retrieved from CNN World: <https://edition.cnn.com/2017/05/29/asia/north-korea-missile-tests/index.html>
- CBS News. (2016, 07 13). *Locals pen letters in blood to protest U.S. missile defense site*. Retrieved from CBS News: <https://www.cbsnews.com/news/south-korea-seongju-angry-us-thaad-missile-defense-north-korea-threat/>
- Chandran, N. (2018, 10 10). *Seoul is relying on big companies to invest in North Korea, so promised reforms are taking a backseat*. Retrieved from CNBC: <https://www.cnbc.com/2018/10/10/seoul-relies-on-chaebols-for-north-korea-investment-so-reform-doubtful.html>
- Chang, S. (2003). *Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups ; The Rise and Fall of Chaebols*. Cambridge University Press.
- China Daily. (2014, July 04). *Top 10 S. Korean companies operating in China*. Retrieved from China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/business/2014-07/04/content_17646287.htm
- Cho, M. (2015, April 6). *The chaebols: The rise of South Korea's mighty conglomerates*. Retrieved from CNET: <https://www.cnet.com/news/the-chaebols-the-rise-of-south-koreas-mighty-conglomerates/>

- Cho, Y., & Kim, J. (1995). *Credit Policies and the Industrialization of Korea*. Washington: The World Bank.
- Choi, K. (2017, 02 28). *(2nd LD) Military, Lotte sign land swap deal for THAAD deployment*. Retrieved from Yonhap News Agency: <http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/02/28/0401000000AEN20170228004052315.html>
- Chung, C. (1995). Past Their Prime: Reassessing the Role of Korean Chaebols. *Harvard International Review*, Vol. 17, 64-65, 92-93.
- Chung, J. (2012). Korean Views of Korea-China Relations Evolving Perceptions and Upcoming Challenges. *Asian Perspective* 36 , 219-236.
- Chung, S. (2011). Innovation, Competitiveness, and Growth: Korean Experiences. *Science and Technology Policy Institute (STEPI)*, 341.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. America: SAGE Publications. Inc.
- Dr. J.R. Raco, M. M. (2010). *metode penelitian kuantitatif*. jakarta: grasindo.
- Fensom, A. (2017, 06 19). *South Korea's Chaebol Needn't Fear Moon*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/06/south-koreas-chaebol-neednt-fear-moon/>
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Gurtov, M. (2017). Diplomatic Remedies for THAAD Madness: The US, China and the Two Koreas. *The Asia-Pacific Journal* .
- Hee, J. M. (2017, May 8). *Lotte Faces 500 Billion Won Losses in China over THAAD Retaliation*. Retrieved from Business Korea: <http://businesskorea.co.kr/english/news/national/18007-no-exit-seen-lotte-faces-500-billion-won-losses-china-over-thaad-retaliation>
- IPFS. (2016, 08 31). *Five-Year Plans of South Korea*. Retrieved from IPFS: https://ipfs.io/ipfs/QmXoyvizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Five-year_plans_of_South_Korea.html
- Jwa, S. (2014). Success Principles of Park Chung Hee: Economics Discrimination and Economization of Politics.
- Kalinowski, T. (2008). Korea's Recovery since the 1997/98 Financial Crisis: The Last Stage of the Developmental State. *Kalinowski, T. (2008). Korea's Recovery since the 1997/98 Financial Crisis: The LasNew Political Economy*, 13(4), 447-462.

- Kalinowski, T., & Cho, H. (2009). The Political Economy of Financial Liberalization in South Korea: State, Big Business, and. *Asian Survey*, Vol. 49, No. 2, 221-242.
- KBS World. (2017, 03 06). *Lotte Requests Gov't Help to Fend off THAAD Retaliation*. Retrieved from KBS World: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=125737
- Kim, C. (2017, 09 28). *South Korea to offer tax help, loans to firms hit by China reprisals*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-china/south-korea-to-offer-tax-help-loans-to-firms-hit-by-china-reprisals-idUSKCN1C30TD>
- Kim, C., & Chung, J. (2017, 03 20). *South Korea complains to WTO over China response to missile system*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-china-thaad/south-korea-complains-to-wto-over-china-response-to-missile-system-idUSKBN16R03D>
- Kim, C., & Jin, H. (2017, 10 25). *With China dream shattered over missile land deal, Lotte faces costly overhaul*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-lotte-china-analysis/with-china-dream-shattered-over-missile-land-deal-lotte-faces-costly-overhaul-idUSKBN1CT35Y>
- Kim, J. (2006). The Next Stage of Reforms: Korean Corporate Governance in the Post-Asian Financial Crisis Era. *Asian Journal of Comparative Law*.
- Kim, K. (2006). The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response, and Lessons. *The High-Level Seminar on Crisis Prevention in Emerging Markets* (p. 13). Singapore: The International Monetary Fund and The Government of Singapore .
- Kim, O., Jeon, H., Kim, H., & Heo, U. (2008). The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis. *Contemporary Asian Studies: Vol. 2008: No. 2, Article 1*.
- Kim, S. (2012). Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention. *Asian Perspective* 3, 237-262.
- Kim, S. (2012). Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention. *Asian Perspective: April-June 2012, Vol. 36, No. 2, 237-262*.
- Kim, S. (2017, 09 15). *Lotte to sell off its Chinese retail branches*. Retrieved from Hankyoreh Hani: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/811206.html
- Lee, Y. (1997). State Autonomy and Big Business. In Y. Lee, *The State, Society and Big Business in South Korea*. London : Routledge.
- Lemma, A., & te Velde, D. W. (2015). State-business relations as drivers of economic performance. *WIDER Working Paper 2015/098*.

- Lim, W. (2000). *The origin and evolution of the Korean economic system*. Seoul: Korea Development Institute.
- Lim, W. (2003). The Emergence of the Chaebol and the Origins of the Chaebol Problem. In S. Haggard, W. Lim, & E. Kim, *Economic Crisis and Corporate Restructuring in Korea: Reforming the Chaebol*. Cambridge University Press.
- Lim, W., & H. K. (2000). *The origin and evolution of the Korean economic system*. Seoul: Korea Development Institute.
- Mah, J. S. (20017). Industrial Policy and Economic Development: Korea's Experience. *Journal of Economic Issues*, Vol. 41, No. 1, 77-92.
- Marsh, D., & Stocker, G. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Meick, E., & Salidjanova, N. (2017). China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implications. *U.S.-China Economic and Security Review Commission*.
- Moon, C., & Rhyu, S. (2002). In Y. Kim, H. Lee, & I. Mah, *Redefining Korean Politics Lost Paradigm an New Fision*. Seoul: Korean Poitic Science Association.
- Mugasejati, N. P., & Rais, A. H. (2011). *Politik Kerjasama Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Institute of International Studies Jurusan Ilmu Hubungan International. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Maa.
- Mullen, J., & Han, S. (2017, 3 7). *One company is bearing the brunt of China's anger over U.S. missile system*. Retrieved from CNN Money: <https://money.cnn.com/2017/03/07/news/china-lotte-thaad-south-korea-tensions/index.html>
- Mullen, J., & Hancocks, P. (2017, 04 4). *South Korean company to China: Don't blame us for THAAD missiles*. Retrieved from CNN Money: <http://money.cnn.com/2017/04/03/news/economy/lotte-south-korea-china-thaad-shin-dong-bin/index.html>
- Murillo Bonvehí, D., & Yun-dal, S. (2013). *Understanding Korean capitalism: Chaebols and their corporate governance*. Barcelona : ESADEgeo Position Paper No. 33.
- Panda, A. (2017, November 13). *China and South Korea: Examining the Resolution of the THAAD Impasse*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/11/china-and-south-korea-examining-the-resolution-of-the-thaad-impasse/>
- Panda, A. (2017, 11 13). *China and South Korea: Examining the Resolution of the THAAD Impasse*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/11/china-and-south-korea-examining-the-resolution-of-the-thaad-impasse/>

- Park, T. (1998). South Korea in 1997: Clearing the Last Hurdle to Political-Economic Maturation. *Asian Survey*, 38, no.1, 1-10.
- Phil Sang, L. (2000). Economic Crisis and Chaebol Reform in Korea. *Discussion Paper Series APEC Study Center Columbia Business School* .
- Reuters. (2017, February 27). *South Korea's Lotte approves land swap for missile defence: ministry*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-thaad-lotte/south-koreas-lotte-approves-land-swap-for-missile-defence-ministry-idUSKBN1660P6>
- Rhyu, S. (2005). The Origins of Korean Chaebols and their Roots in the Korean war. *The Korean Journal of International Studies*.
- Ryall, J. (2017, September 5). *What is THAAD? South Korea's best defence against a missile attack*. Retrieved from The Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/0/thaad-south-koreas-best-defence-against-missile-attack/>
- Schepers, S. (2010). Business-government relations: beyond lobbying. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 475-483.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba.
- Sen, K. (2015). *State-business relations: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
- Sohn, C. (2002). Korea's Corporate Restructuring since the Financial Crisis: Measures and Assessment. *Promoting Growth and Welfare: Structural*. Santiago and Rio de Janeiro: Korea Institute for International Economic Policy.
- Sohn, I. (2017, 03 08). *Lotte in THAAD conundrum seeks govt help to save Chinese operation*. Retrieved from Pulse News: <https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2017&no=152797>
- Song, S. (2018, 09 18). *Chaebol chiefs head to Pyongyang with lips sealed about business in the North*. Retrieved from The Korean Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180918000560>
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian* . Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suzuki, S. (2018, 09 19). *South Korean tycoons join Moon in Pyongyang*. Retrieved from Asia Nikkei: <https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/South-Korean-tycoons-join-Moon-in-Pyongyang>
- Tejada, C. (2017, 02 17). *Money, Power, Family: Inside South Korea's Chaebol*. Retrieved from NY Times: <https://www.nytimes.com/2017/02/17/business/south-korea-chaebol-samsung.html>

- WITS. (2016). *Republic of Korea Trade Statistic*. Retrieved from World Integrated Trade Solution:
<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KOR/Year/LTST/TradeFlow/Import/Partner/all/>
- Woo, J. (1991). *Race to the swift: state and finance in Korean industrialization*. New York: Columbia University Press.
- Xinhua. (2017, 02 28).
<http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/02/28/0401000000AEN20170228004052315.html>. Retrieved from Xinhuanet:
http://www.xinhuanet.com/english/2017-02/28/c_136091321.htm
- Young, R. S. (2005). The Origins of Korean Chaebols and their Roots in the Korean war. *The Korean Journal of International Studies*.